

**EVALUASI PROGRAM PAKET MASA DEPAN (PMD)  
DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT  
PEREMPUAN MISKIN DI PEDESAAN  
(STUDI PADA BTPN SYARIAH MMS EROMOKO)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dari  
Program Studi Ekonomi Islam



Oleh

**RIRIS TRI ASMOROWATI**

14423183

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2018**

## LEMBAR PERNYATAAN

### LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riris Tri Asmorowati  
Nim : 14423183  
Program Studi : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : Evaluasi Program Paket Masa Depan (PMD) Dalam  
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perempuan  
Miskin Di Pedesaan (Studi Pada BTPN Syariah  
MMS Eromoko)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulis Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau pejiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 18 September 2018



Riris Tri Asmorowati

# LEMBAR PENGESAHAN



## UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta  
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail: fial@uii.ac.id

### PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 3 Oktober 2018  
Judul Skripsi : Evaluasi Program Paket Masa Depan (PMD) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perempuan Miskin di Pedesaan (Studi Kasus pada BTPN Syariah MMS Eromoko)  
Disusun oleh : RIRIS TRI ASMOROWATI  
Nomor Mahasiswa : 14423183

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

#### TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Anton Priyo Nugroho, SE, MM .....  
Penguji I : Dr. Siti Achiria, SE, MM .....  
Penguji II : Rakhmawati, S.Stat, MA .....  
Pembimbing : Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I. ....

Yogyakarta, 9 Oktober 2018



- ☐ Syaria'h/Ahwal Al-Syakhshiyah, Akreditasi A berdasarkan SK No. 112/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015
- ☐ Pendidikan Agama Islam, Akreditasi A berdasarkan SK No. 502/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015
- ☐ Ekonomi Islam, Akreditasi B berdasarkan SK No. 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014

## REKOMENDASI PEMBIMBING

### REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertandatangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi :

Nama Mahasiswa : Riris Tri Asmorowati  
Nomor Mahasiswa : 14423183  
Judul Skripsi : Evaluasi Program Paket Masa Depan (PMD)  
Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat  
Perempuan Miskin Di Pedesaan (Studi Pada  
BTPN Syariah MMS Eromoko)

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 18 September 2018



Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I.

## NOTA DINAS

Yogyakarta, 18 September 2018

### NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr, Wb*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 2316/Dek/60/DAS/FIAI/IX/2016 tanggal 22 september 2016 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara :

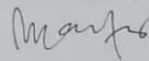
Nama : Riris Tri Asmorowati  
Nomor/Pokok NIMKO : 14423183  
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Program Study Konsentrasi : Ekonomi Islam Perbankan Syariah  
Tahun Akademik : 2017/2018  
Judul Skripsi : Evaluasi Program Paket Masa Depan (PMD)  
Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat  
Perempuan Miskin Di Pedesaan (Studi Pada  
BTPN Syariah MMS Eromoko)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan sepenuhnya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan , dan bersama ini kami kirimkan 3 (tiga) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalamu 'alaikum Wr, Wb.*

Dosen Pembimbing



Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I.

## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

### **Yang Utama Dari Segalanya ...**

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan saya kekuatan, membekali saya dengan ilmu serta memperkenalkan saya dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

### **Kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang kusayangi ...**

Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu dan Alm.Bapak yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih,inspirasi yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Alm.Bahagia bahagia karena selama ini belum bisa berbuat yang lebih untuk Ibu dan Alm. Bapak yang selalu memberiku dukungan, motivasi, mendoakan yang terbaik, dan selalu menasehatiku untuk menjadi lebih baik. Terima kasih juga kepada kakak-kakak saya Wahyu, Lilis, Muji yang selalu mendukungku dan memotivasi. Agus Sandra Dwi Atmaja yang selalu mendukung saya dan marah kalo saya santai-santai, karena dengan cara tersebut saya menjadi lebih semangat untuk selalu lebih memperbaiki diri dan mencoba untuk selalu membanggakan keluarga tersayang.

### **Teman-teman Ekonomi Islam 2014 ...**

Terima kasih kepada teman-teman ekonomi islam 2014 yang telah menemani saya dari awal masuk perkuliahan hingga akhirnya menemui titik akhir perkuliahan pada jenjang S1, terima kasih juga kepada beberapa teman-teman yang telah memberikan masukan memberikan arahan terkait pengerjaan skripsi ini, berkat mereka skripsi ini dapat selesai.

### **Dosen Pembimbing Tugas Akhirku ...**

Kepada Ibu Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingannya selama ini memberikan masukan dan arah untuk terselesaikannya skripsi ini, dan seluruh Dosen pengajar di fakultas Ilmu Agama Islam dan yang lainnya.

Terima kasih banyak untuk semua ilmu, didikan dan pengalaman yang sangat berarti yang telah memberikan kepada saya sebagai salah satu mahasiswa Universitas Islam Indonesia

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

**“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”**

**(QS. Ar Ra'd ayat 11)**



**ABSTRAK**  
**EVALUASI PROGRAM PAKET MASA DEPAN (PMD) DALAM**  
**PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PEREMPUAN MISKIN**  
**DI PEDESAAN (STUDI PADA BTPN SYARIAH MMS EROMOKO)**

**Oleh :**

**Riris Tri Asmorowati**

**(14423183)**

Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) adalah salah satu produk penyaluran dana sebagai modal usaha mikro bagi perempuan miskin dipedesaan yang menggunakan akad *wakalah wal murabahah* dari PT. BTPN Syariah dilengkapi dengan kegiatan pendukung seperti tabungan, asuransi dan pembinaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi program pembiayaan PMD di BTPN Syariah MMS Eromoko dengan menggunakan metode evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dimana hasil data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah nasabah program pemberdayaan PMD BTPN Syariah MMS Eromoko ditetapkan sejumlah 15 responden . Hasil dari evaluasi dengan model CIPP didapat Program PMD BTPN telah didistribusikan sesuai sasaran dan tujuannya, pada pelaksanaan akad pembiayaan dengan menggunakan akad *Wakalah wal Murabahah* tidak menyalahi prinsip syariah dimana pelaksanaan akad dilakukan secara terpisah, tetapi program pembiayaan PMD belum memberikan dampak pemberdayaan yang maksimal kepada seluruh wanita miskin yang menjadi nasabah karena kurang maksimalnya kegiatan pendampingan yang diberikan oleh petugas.

**Kata Kunci : Program Pembiayaan PMD, Evaluasi, BTPN Syariah**

## **ABSTRACT**

### **EVALUATION ON PAKET MASA DEPAN (PMD) PROGRAM IN ECONOMIC EMPOWERMENT AMONG THE POOR FEMALE COMMUNITIES IN RURAL AREA (STUDY ON BTPN SYARIAH MMS EROMOKO)**

**By:**

**Riris Tri Asmorowati**

**(14423183)**

*The finance for Paket Masa Depan (PMD) or Future Packet program is one of products in fund distribution as micro business capital for the poor females in rural area using the contract of wakalah wal murabahah from PT. BTPN Syariah also supported with any supporting activities such as savings, insurance and coaching. The aim of this research was to evaluate the finance program of PMD in BTPN Syariah MMS Eromoko using the evaluation method of CIPP (Context, Input, Process, and Product). This research used a qualitative method in which the data were obtained through interview, observation and documentation. The sample used in this research was the customers of the empowerment program of PMD BTPN Syariah MMS Eromoko and there were 15 respondents fixed. The result of the evaluation with CIPP program showed that the Program of PMD BTPN has been distributed on target and on purpose. Here, the implementation of finance contract using the contract of Wakalah wal Murabahah was not out of the sharia principles in which the contract implementation was done separately. The program of PMD finance has not shown any maximum empowerment impact on all poor females that become the customers. It is related to the lack of coaching activities given by the officials.*

**Keywords: Finance Program of PMD, Evaluation, BTPN Syariah**

**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

**TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

**Pendahuluan**

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di-pergunakan untuk menuliskan kitab Agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur<sup>an</sup> dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada semi nar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

## **Pengertian Transliterasi**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

## **Prinsip Pembakuan**

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

## **Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin**

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab - Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta<sup>ʿ</sup>marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf capital
10. Tajwid

### **1. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi

dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Z ai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
سڊ	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
سڊڤ	Ďad	Ď	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
... يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
... وَ	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... اِ...ِ	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
... اِ...ِ	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
... وُ...ِ	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قال - qāla      قيل - qīla  
رمى - ramā      يقول - yaqūlu

4. Ta'Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta marbutah mati



Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbu"ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -raudah al-atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah

طَلْحَةَ -talhah

## 5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā                      الْحَجَّ - al-hajj

نَزَّلَ - nazzala                      نَعْمَ nu''ima

الْبِرِّ - al-birr

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik dikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu	الْقَلَمُ	alqalamu
السَّيِّدُ	- as-sayyidu	الْبَيْعُ	al-badī'u
الشَّمْسُ	- as-syamsu	الْجَلَالُ	al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuḏūna	إِنَّ	- inna
النَّوْءُ	- an-nau'	أُمِرْتُ	umirtu
شَيْءٌ	- syai'un	أَكَلَ	-akala

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata ter-tentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khairrāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Wa auf al-kaila wa-almīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursahā
وَعَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Walillāhi alan-nāsi-hijjual-baiti manistatā'ailaihisabīla

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana Nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مَحَّ مَدُّ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ	Inna awwala baitin wudi'a linnāsi
لَاذِي	lallaẓī bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ	Syahrū Ramadān al-laẓī unzila fih al-
الْقُرْآنُ	Qur'ānu
	Syahrū Ramadān al-laẓī unzila fihil
	Qur'ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn
	Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīn
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbil al-'ālamīn
	Alhamdu lillāhi rabbilil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau har-kat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	Lillāhi al-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	Wallāha bikulli syai'in 'alīm

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan

Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'alaikum warrahmatullahi wabarakaatuh,*

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah penguasa semesta atas segala limpahan rahmat dan anugerah kepada kita semua, akhirnya penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini, shalawat dan salam senantiasa penyusun sanjungkan kepada beliau Nabi Agung junjungan kami Muhammad SAW, beserta segenap keluarga dan para sahabatnya hingga akhir nanti.

Sebagai sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam di Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, maka penyusun menyusun skripsi dengan judul **“Evaluasi Program Paket Masa Depan (PMD) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perempuan Miskin Di Pedesaan (Studi Pada BTPN Syariah MMS Eromoko)”**.

Penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan, pengalaman dan pengetahuan dari penyusun. Dalam penyelesaian skripsi ini penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusun sepantasnya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Fathul Wahid S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia .
2. Bapak Drs. H. M. Tamyiz Mukharrom, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Ibu Soya Sobaya S.E., MM selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam FIAI Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu kepada penyusun dalam rangka membimbing penyelesaian penelitian ini.
6. Orang tua saya Alm. Bapak Manting Sudarsono yang selalu menginspirasi saya dan Ibu Wardinem yang telah banyak memberikan segala kasih sayang, dan doa tulus kepada penulis, serta dorongan motivasi semangat dan dukungan hingga selesai penelitian ini.
7. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan ilmu kepada penulis serta membantu dan mempermudah penyusun mengurus administrasi baik dalam penyusunan skripsi maupun selama proses perkuliahan.
8. Kakak-kakak saya Wahyu, Lilis, Muji yang selalu mendukung dan mendukung.
9. Agus sandra Dwi Atmaja yang selalu mendukung,memberikan motivasi, dan membantu saya dalam mengerjakan sripsi.
10. Kepada Seluruh pihak BTPN Syariah MMS Eromoko Mbak Tiara, Putri, Melati yang telah memberi kesempatan kepada penyusun untuk melaksanakan penelitian, dan terimakasih telah bersedia menjadi narasumber peneliti.
11. Seluruh teman Ekonomi Islam angkatan 2014, Ekis C 2014, yang telah bersama-sama menimba ilmu dan pengalaman di kampus UII tercinta.
12. Teman-teman seperjuangan bimbingan skripsi yang selalu memberi motivasi dan membantu penulis Asri, Dwi, Maria, Zum, Ayu, Puji.
13. Pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan penelitian yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu. Terimah kasih banyak untuk semuanya.

Semoga segala bentuk dukungan yang diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Sewajarnya manusia yang jauh dari kesempurnaan, penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Kritik dan

saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan yang akan datang. Semoga apa yang sudah penyusun berikan dapat menjadi manfaat untuk berbagai pihak. Amiin.

*Wasalam mu'alaikum warrahmatullahi wabarakaatuh,*

Yogyakarta, 14 September 2018  
Penyusun

Riris Tri Asmorowati

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING .....	iv
NOTA DINAS .....	v
LEMBAR PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN MOTO .....	viii
ABSTRAK .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	x
KATA PENGANTAR .....	xxi
DAFTAR ISI.....	xxiv
DAFTAR TABEL.....	xxvii
DAFTAR GAMBAR .....	xxviii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	7
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	9
A. Telaah Pustaka .....	9



B. Landasan Teori.....	18
1. Evaluasi .....	18
2. Model Evaluasi CIPP ( <i>Context, Input, Process, Product</i> ) .....	19
3. Bank Syariah .....	20
4. Pembiayaan ( <i>Financing</i> ) .....	21
5. Pemberdayaan Perempuan .....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Desain Penelitian .....	27
B. Lokasi, Waktu, dan Objek Penelitian .....	27
C. Populasi dan Sampel .....	28
D. Sumber Data .....	28
E. Teknik Pengumpulan Data .....	29
F. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional .....	30
G. Instrumen Penelitian .....	32
H. Teknik Analisis Data .....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Paparan Data Hasil Penelitian .....	35
1. Sejarah Singkat BTPN Syariah .....	35
2. Visi dan Misi BTPN Syariah.....	35
3. Struktur Organisasi BTPN Syariah MMS Eromoko .....	36
4. Produk BTPN Syariah .....	37
5. Deskripsi Responden .....	39
B. Hasil Analisis Data Penelitian .....	45
1. Evaluasi Terhadap <i>Context</i> .....	45
2. Evaluasi Terhadap <i>Input</i> .....	51

3. Evaluasi Terhadap <i>Process</i> .....	57
4. Evaluasi Terhadap <i>Product</i> .....	67
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	74
BAB V PENUTUP .....	76
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79
DARTAR PUSTAKA .....	80
LAMPIRAN .....	85

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan tingkat perempuan dan laki-laki berdasarkan data SUSENAS (2015) .....	2
Tabel 1.2 Laporan Keuangan BTPN Syariah Tahun 2015-2017 .....	4
Tabel 2.1 Ringkasan Telaah Pustaka .....	15
Tabel 3.1 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional.....	30
Tabel 3.2 Instrumen Penelitian .....	32
Tabel 4.1 Gambaran Identitas responden.....	39
Tabel 4.2 Identitas Umur Responden.....	41
Tabel 4.3 Hasil Evaluasi terhadap <i>Context</i> .....	49
Tabel 4.4 Hasil Evaluasi terhadap <i>Input</i> .....	56
Tabel 4.5 Pola Pembiayaan PMD .....	62
Tabel 4.6 Hasil Evaluasi terhadap <i>Process</i> .....	65
Tabel 4.7 Identitas masyarakat kecamatan Eromoko dan Dampak pembiayaan PMD bagi nasabah Kec Eromoko .....	68
Tabel 4.8 Hasil Observasi .....	71
Tabel 4.9 Hasil Evaluasi terhadap <i>Product</i> .....	73

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BTPN Syariah MMS Eromoko .....	36
Gambar 4.2 Pendidikan terakhir responden. ....	41
Gambar 4.3 Diagram identitas jenis usaha responden .....	42
Gambar 4.4 Diagram identitas pekerjaan suami responden .....	43
Gambar 4.5 Grafik plafond pembiayaan responden .....	44
Gambar 4.6 Grafik jangka waktu pembiayaan .....	44
Gambar 4.7 Prosedur Pembiayaan PMD .....	55
Gambar 4.8 Jumlah nasabah pembiayaan PMD BTPN Syariah MMS Eromoko .	60

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masalah utama yang dihadapi di dunia terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah kemiskinan. Kemiskinan terjadi akibat keterbatasan manusia dalam pemenuhan kebutuhannya. Keterbatasan disini maksudnya adalah tidak sedikitnya manusia yang tidak memiliki *skill* yang dapat digunakan sebagai modal dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Mata rantai kemiskinan di Indonesia belum terputus mulai masa awal kemerdekaan sampai masa reformasi seperti sekarang ini. Kebijakan pemerintah yang terkait dengan pengentasan kemiskinan tidak mampu memberikan dampak yang signifikan bahkan seakan terkesan stagnan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), *presentase* penduduk miskin September 2017, menurun 0,52 % dibandingkan Maret 2017 yang sebesar 10,64 %. Sementara jumlah penduduk miskin turun menjadi 26,58 juta dari sebelumnya Maret 2017 sebesar 27,77 juta. Kemiskinan menjadi salah satu ukuran terpenting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang ditandai dengan pengangguran, keterbelakangan, dan keterpurukan (Agung & Titin, 2014).

Kemiskinan telah memberikan dampak dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari dampak personal, keluarga, dan badan usaha. Namun yang paling vital dari masalah ini semua adalah masalah dalam aspek personal, karena masalah personal dapat mempengaruhi semua sendi perekonomian. Distribusi pendapatan yang tidak merata dan minimnya *skill* masing-masing individu merupakan salah satu penyebab kemiskinan. Bahkan jika individu mempunyai keterampilan tanpa dibarengi dengan kemampuan dana maka aktivitas ekonomi tidak akan berjalan.

Angka kemiskinan yang cukup tinggi di Indonesia tersebut menyebabkan dampak yang kompleks. Salah satu pihak yang terkena dampak dari kemiskinan adalah perempuan. Padahal kondisi dan posisi perempuan di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, antara lain di bidang sosial, politik, ekonomi, pendidikan dan budaya. Fenomena di atas menunjukkan perempuan masih menjadi kaum yang termarginalkan sehingga persoalan pemberdayaan perempuan memiliki bidang garapan yang luas (Supeni & Sari, 2011). Kemiskinan melibatkan seluruh aspek kehidupan. Upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia terutama di perdesaan telah dilakukan melalui berbagai cara, namun pendekatan yang dilakukan adalah peningkatan pendapatan semata (*income generating*) dan kurang memperhatikan peran perempuan miskin sebagai subjek pembangunan. Pengentasan kemiskinan dengan upaya memberdayakan perempuan diharapkan mampu menekan kemiskinan di perdesaan mengingat jumlah rumah tangga miskin yang dikepalai perempuan sebagai kepala rumah tangga terus bertambah. Lebih dari itu, perempuan memiliki posisi penting dalam keluarga, baik sebagai istri, ibu dari anak-anak, bahkan sebagai penopang ekonomi keluarga. (Astuti, 2012).

**Tabel 1.1 Perbandingan tingkat perempuan dan laki-laki berdasarkan data SUSENAS(2015)**

No	Presentase	Laki-laki	Perempuan
1	Partisipasi di Dunia Kerja	65,4 %	34,6%
2	Buta Huruf	2,92 %	4,39%
3	Rumah Tangga Miskin	Menurun 1,09%	Meningkat 1,09%

*Sumber : Data diolah (2018)*

Data diatas menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan perempuan masih dibawah laki-laki. Berdasarkan data dari SUSENAS menunjukkan bahwa jumlah partisipasi perempuan didunia kerja jauh dibawah laki-laki, rumah tangga miskin yang dikepalai oleh perempuan (RTM-P) menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 1,09 % sedangkan RTP-L mengalami penurunan

sebesar 1,09 % selama tahun 2016-2012. Tingkat buta huruf perempuan juga lebih tinggi dari laki-laki yaitu sebesar 4,39% .Hal tersebut memperjelas bahwa tingkat kesejahteraan perempuan perlu banyak diperbaiki dengan melalui berbagai cara. Praktik di banyak Negara berkembang menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro merupakan alat intervensi paling efektif untuk pengentasan kemiskinan di kalangan perempuan (Rahayu, 2015). Seiring dengan berkembangnya lembaga keuangan di Indonesia dengan penawaran produk yang memberikan kontribusi dalam pementasan kemiskinan dengan metode pemberdayaan masyarakat.

Hadiah Nobel perdamaian bagi Muhammad Yunus dengan Grameen Bank-nya di Bangladesh, memberikan pelajaran akan pentingnya institusi keuangan mikro bagi kaum miskin, khususnya di kalangan kaum perempuan. Hal penting lain yang dapat kita ketahui adalah bahwa perempuan memegang peranan penting dalam mentransfer kredit mikro ke keluarga dan lebih lanjut mengentaskan keluarga dari kemiskinan. Hal ini mengingat bahwa 97% dari total 6,61 juta nasabah Grameen Bank adalah perempuan. Program kredit mikro, yang memberikan akses kredit yang lebih luas kepada kaum miskin, telah dianggap sebagai suatu program kunci bagi upaya pemberantasan kemiskinan, mengingat selama ini masyarakat miskin mendapat banyak halangan untuk mengakses sistem atau lembaga perbankan lainnya (Asmorowati, 2004). Uraian mengenai keberhasilan Grameen Bank semakin memperkuat argumen bahwa perempuan memegang peranan penting dalam mentransfer kredit mikro ke keluarga mereka. Permasalahannya kemudian adalah apakah para perempuan yang menjadi kelompok sasaran atau penerima kredit mikro itu benar-benar diuntungkan atau dalam hal ini diberdayakan atau sebaliknya dengan menjadi penerima kredit mikro maka para perempuan dengan peran domestiknya justru semakin dibebani sehingga memperkuat *triple burden of women*, dimana perempuan harus melakukan fungsi reproduksi, produksi dan fungsi sosial di masyarakat (Asmorowati, 2004).

Dari sekian banyak lembaga keuangan yang dipercaya mampu membantu mewujudkan pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan di pedesaan yaitu Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah atau BTPN Syariah. BTPN Syariah beroperasi berdasarkan prinsip inklusi keuangan dengan menyediakan produk dan jasa keuangan kepada masyarakat terpencil yang belum terjangkau serta segmen masyarakat pra-sejahtera. Selain menyediakan akses layanan keuangan kepada masyarakat tersebut, BTPN Syariah juga menyediakan pelatihan keuangan sederhana untuk membantu mata pencaharian nasabahnya agar dapat terus berlanjut serta membina masyarakat yang lebih sehat melalui program Daya-nya. Melalui produk dan aktivitasnya, BTPN Syariah senantiasa mengajak dan melibatkan seluruh *stakeholders* untuk bersama-sama memberikan kemudahan akses masyarakat dalam menggunakan atau memanfaatkan produk dan layanan jasa bank (*financial inclusion*), memberikan informasi, serta kegiatan pemberdayaan yang berkelanjutan dan terukur (www.btpnsyariah, 2018).

**Tabel 1.2 Laporan Keuangan BTPN Syariah Tahun 2015-2017**

No	Laporan Keuangan Pos-Pos	Tahun		
		2015	2016	2017
1	Total Aset	5.196.199	7.323.347	9.156.522
2	Total Pembiayaan	3.678.027	4.996.812	6.053.273
3	Rasio NPF <i>Gross</i>	1,25 %	1,53 %	1,67 %

*Sumber : Data diolah (2018)*

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa BTPN Syariah terus mengalami peningkatan dalam jumlah aset yang dimiliki diiringi dengan kenaikan total pembiayaan yang disalurkan dari tahun ke tahun. Kenaikan dalam jumlah pembiayaan tersebut terbukti positif dengan jumlah rasio NPF *Gross* BTPN Syariah yang menunjukkan bahwa rasio jumlah pembiayaan bermasalah (kotor) dalam rasio aman yaitu pada tahun 2015 berjumlah 1,25 %, tahun 2016 berjumlah 1,53%, dan tahun 2017 berjumlah 1,67 %. Hal



tersebut menunjukkan bahwa BTPN Syariah dikatakan mampu menyalurkan program pembiayaan yang dimilikinya secara positif dan terus bertambah setiap tahunnya diharapkan jumlah pemberdayaan yang diinginkan semakin meluas mencakup seluruh wanita miskin di Indonesia.

Salah satu program unggulan BTPN Syariah yaitu program Paket Masa Depan (PMD). Program Paket Masa Depan memfokuskan kegiatannya pada pemberian pembiayaan sebagai modal usaha bagi perempuan miskin dipedesaan dalam memulai usaha dengan harapan dapat meningkatkan keahlian dan pendapatan ekonomi masyarakat desa. Dengan adanya pemberdayaan perempuan miskin dipedesaan ini menjadi pencapaian penting dalam keberhasilan program PMD. Namun berdasarkan *prasurvey* yang dilakukan penulis fakta di lapangan terdapat beberapa masalah yang mungkin saja menghambat tercapainya tujuan dari program ini. Mulai dari tidak adanya tindak lanjut dari program ini, seperti tidak adanya kontrol dari pihak bank. Maksud dari kontrol bank ini adalah untuk memastikan bahwa tidak ada indikasi program dari warga miskin yang tidak tepat sasaran.

Fakta di lapangan tidak sedikit penulis jumpai dalam *pra survey* penelitian kasus seperti warga miskin mengajukan pembiayaan kepada bank, namun dana untuk pembiayaan tersebut digunakan untuk kegiatan konsumtif. Berangkat dari kasus diatas maka pihak bank haruslah melakukan *control* kepada nasabah. Selanjutnya tidak adanya pengawasan dari pihak bank terhadap nasabah yang telah memiliki usaha apakah usaha tersebut berkembang atau tidak. Dari contoh beberapa kasus diatas maka harus adanya evaluasi terhadap program Paket Masa Depan (PMD), apakah sesuai dengan tujuannya yaitu untuk mememberdayakan perempuan miskin di pedesaan. Bagaimanakah cara BTPN Syariah dalam usaha mendukung keberhasilan mensejahterakan masyarakat desa khususnya kaum perempuan menuju ke arah yang lebih baik sehingga usaha yang dijalankan dapat berjalan lebih sempurna.

Berdasarkan hasil *pra survey* yang dilakukan penyusun salah satu kelompok program pemberdayaan masyarakat PMD BTPN Syariah yang

begitu antusias dalam menjalani pelatihan yaitu ibu-ibu masyarakat Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri. Karena di Kecamatan Eromoko tingkat ekonomi masyarakatnya masih menengah ke bawah. Sehingga hal tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai bagaimana BTPN Syariah mampu menjalankan dan menerapkan program Paket Masa Depan (PMD) pada masyarakat pedesaan dengan baik. Sehingga diharapkan dengan adanya program PMD ini kedepannya mampu mewujudkan pemberdayaan perempuan miskin di desa mampu membawa kehidupan keluarga lebih baik dari sebelumnya dan perempuan sebagai kepala keluarga mampu menompang keluarganya dalam kesejahteraan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penyusun tertarik untuk meneliti dan mengkaji bagaimana pelaksanaan program pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) pada BTPN Syariah MMS Eromoko apakah tercapai tujuannya dalam memperdayakan perempuan miskin dipedesaan. Dengan demikian dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan, mengingat pentingnya pemberdayaan masyarakat khususnya kaum perempuan melalui lembaga keuangan perbankan serta pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyusun akan mengadakan suatu penelitian yang berjudul **“Evaluasi Program Paket Masa Depan (PMD) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perempuan Miskin Di Pedesaan (Studi Khusus Pada BTPN Syariah MMS Eromoko)”**.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana evaluasi Program Paket Masa Depan (PMD) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat perempuan miskin di pedesaan dengan model evaluasi CIPP?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Program Paket Masa Depan (PMD) dalam pemberdayaan

ekonomi masyarakat perempuan miskin di pedesaan dengan model evaluasi CIPP

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Aspek akademisi
  - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan referensi bagi akademisi yang ingin melakukan penelitian lebih mendalam mengenai evaluasi program PMD.
  - b. Dapat menambah *khazanah* keilmuan dan meningkatkan pengetahuan akan praktek Ekonomi Islam dalam program pembiayaan PMD.
2. Aspek praktis
  - a. Bagi BTPN Syariah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi kebijakan dan keputusan yang diambil bagi lembaga perusahaan BTPN Syariah.
  - b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam memilih program pembiayaan.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Agar memudahkan dalam penulisan skripsi, maka penulis membaginya dalam beberapa bab. Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab. Masing masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasannya, secara global penyusun merangkumnya dalam sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

Pada Bab I ini penyusun menjelaskan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Pada Bab II ini menjelaskan seputar telaah pustaka yang terdiri dari 9 jurnal ilmiah dan landasan teori yang digunakan dalam penelitian.

Pada Bab III ini menjelaskan seputar metodologi yang digunakan penyusun dalam meneliti penelitian ini. Metodologi terbagi menjadi beberapa bagian pokok yang akan dijelaskan satu persatu. Pokok-pokok tersebut adalah: desain penelitian, lokasi waktu dan obyek pelaksanaan penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, definisi konseptual variabel dan definisi operasional variabel, instrumen penelitian yang digunakan, dan terakhir teknik analisis data.

Pada BabIV ini peneliti membahas pada hasil penelitian dan pembahasan yang didapat selama proses penelitian. Pembahasan dibagi dalam 3 tahap yaitu paparan data hasil penelitian, hasil analisis data penelitian dan pembahasan.

Pada babV adalah penutup dari bab proposal, penyusun memberikan kesimpulan berdasarkan isi dari teori dan dari hasil penelitian diatas, dan pemberian saran untuk kesempurnaan penelitian.

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### A. Telaah Pustaka

Kegiatan penelitian akan selalu bertitik tolak dari penelitian-penelitian terdahulu. Hal ini digunakan untuk dapat mengidentifikasi, menelaah, dan membandingkan laporan hasil penelitian terdahulu untuk menjadi referensi penelitian yang akan diadakan. Adapun telaah pustaka yang dilakukan peneliti adalah menggali apa yang sudah dikemukakan oleh para peneliti terdahulu dalam bentuk jurnal dan karya ilmiah lainnya. Adapun referensi yang penulis maksudkan sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian oleh Rianti Pratiwi yang berjudul “Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mendorong Usaha Kaum Perempuan”. Menunjukkan bahwa LKMS harus dapat berperan sebagai pusat pembelajaran bagi nasabahnya, yakni dengan memberikan pendampingan, baik dalam hal administrasi keuangan usaha, maupun mensosialisasikan pemahaman tentang ekonomi Islam. Hal-hal tersebut merupakan kesatuan perangkat agar tujuan dari adanya pembiayaan mikro yang ditujukan kepada kaum perempuan tidak menyimpang, yaitu mewujudkan kemaslahatan (Pratiwi, 2014). Keterkaitan penelitian ini dengan judul skripsi yang penulis angkat adalah sama-sama membahas program pemberdayaan perempuan di desa. Penyusun perlu untuk melengkapi karena dalam penelitian ini hanya membahas tentang programnya saja tanpa mengevaluasi program tersebut.

*Kedua*, penelitian yang membahas tentang pemberdayaan perempuan melalui pendekatan *social entrepreneurship*, jurnal yang ditulis oleh Mulia Astuti yang berjudul “Pemberdayaan Perempuan Miskin Berbasis Pemanfaatan Sumberdaya Lokal Melalui Pendekatan Sosial Entrepreneurship (Studi Kasus di Daerah Tertinggal, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat)”. Mengungkapkan kenyataan di lapangan tentang kondisi sesungguhnya perempuan miskin, Faktor-

faktor yang mempengaruhi perempuan miskin dalam pemanfaatan sumber daya lokal antara lain faktor dari dalam dirinya yaitu pendidikannya yang rendah (77 % SD dan tidak tamat SD) , tidak punya keterampilan selain bertani dan yang datang dari luar dirinya yaitu mereka belum terjangkau oleh program pengentasan kemiskinan dari pemerintah ataupun pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep model dalam penelitian ini dapat diterapkan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan miskin, menciptakan lapangan kerja baru bagi perempuan dengan memanfaatkan potensi ikan lokal(Astuti, 2012). Keterkaitan penelitian ini dengan skripsi yang penulis angkat adalah sama-sama membahas program pemberdayaan perempuan di desa. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini pemberdayaan perempuan dengan memberikan pengetahuan saja tanpa memberikan modal sebagai awal usaha pemberdayaan perempuan, sehingga penulis perlu melengkapi penelitian ini dengan menggabungkan pengetahuan dan pemberian modal usaha.

*Ketiga*, dalam jurnal yang ditulis oleh Evi Steelyana (Perempuan dan Perbankan: Sebuah Tinjauan Tentang Peran Inklusi Keuangan Terhadap Pengusaha UMKM Perempuan Di Indonesia). Menjelaskan Perhatian kepada pengusaha perempuan ditunjukkan dengan cara meningkatkan kualitas produk dan layanannya bagi nasabah dari kaum hawa. Pemberian kredit kepada para pengusaha perempuan dan pemberian akses perbankan bagi para pengusaha UMKM perempuan. Perempuan merupakan pasar yang sangat potensial bagi bank komersial, mengingat masih banyak di antaranya yang belum terlayani oleh akses perbankan. Pihak perbankan dapat memperluas akses dan fasilitas bagi UMKM bagi para pengusaha perempuan dengan melakukan pemberian kredit untuk memperluas usaha. Evi Steelyana juga menjelaskan agar program inklusi keuangan dapat berdampak secara signifikan terhadap pengusaha UMKM khususnya para pengusaha perempuan salah satunya melakukan edukasi keuangan bagi para pengusaha UMKM perempuan dan juga memberi pembekalan tentang pengenalan layanan perbankan dan aksesperbankan serta manfaat perbankan bagi para pengusaha perempuan (Steelyana, 2013). Keterkaitan penelitian ini dengan judul skripsi yang penulis angkat adalah sama-

sama membahas program pemberdayaan perempuan di desa. Namun dalam penelitian ini hanya membahas tentang programnya saja tanpa mengevaluasi program tersebut.

*Keempat*, dalam penelitian yang ditulis oleh Ninik Sri Rahayu yang berjudul “Kontribusi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Perempuan (Studi Khusus BMT di Kabupaten Sleman Yogyakarta)”. Perempuan diasumsikan akan lebih berdaya jika berpartisipasi dalam layanan lembaga keuangan mikro syariah dibanding yang tidak berpartisipasi. Hal ini karena mereka berpeluang untuk memperoleh pendapatan melalui berbagai aktifitas ekonomi produktif yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusi mereka terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga, akses dan peran terhadap pengambilan keputusan serta control terhadap alokasi sumber daya yang dimiliki oleh keluarga. Ninik Sri Rahayu menyimpulkan secara statistik terdapat perbedaan signifikan kontrol tabungan dan pendapatan usaha, pengambilan keputusan, mobilitas dan partisipasi antara perempuan yang menjadi anggota BMT dan nonBMT (Rahayu, 2015). Penelitian ini masih bersifat simbolik dan umum, sehingga penyusun perlu melengkapi dengan program konkrit untuk meningkatkan pendapatan perempuan di desa dengan pemberdayaan perempuan.

*Kelima*, jurnal yang ditulis oleh Sulikah Asmorowati (Dampak Pemberian Kredit Mikro untuk Perempuan: Analisis Pengadopsian Model Grameen Bank di Indonesia). Dalam penelitiannya Sulikah Asmorowati menjelaskan hadiah Nobel perdamaian bagi Muhammad Yunus dengan Grameen Bank-nya di Bangladesh, memberikan pelajaran akan pentingnya institusi keuangan mikro bagi kaum miskin, khususnya di kalangan kaum perempuan. Hal penting lain yang dapat kita ketahui adalah bahwa perempuan memegang peranan penting dalam mentransfer kredit mikro ke keluarga dan lebih lanjut mengentaskan keluarga dari kemiskinan. Hal ini mengingat bahwa 97% dari total 6,61 juta nasabah Grameen Bank adalah perempuan. Program kredit mikro, yang memberikan akses kredit yang lebih luas kepada kaum miskin, telah dianggap sebagai suatu program kunci bagi upaya pemberantasan kemiskinan, mengingat selama ini masyarakat miskin mendapat banyak halangan untuk mengakses sistem atau

lembaga perbankan lainnya. Keberhasilan Grammen Bank semakin memperkuat argumen bahwa perempuan memegang peranan penting dalam mentransfer kredit mikro ke keluarga mereka. Permasalahannya kemudian adalah apakah para perempuan yang menjadi kelompok sasaran atau penerima kredit mikro itu benar-benar diuntungkan atau dalam hal ini diberdayakan atau sebaliknya dengan menjadi penerima kredit mikro maka para perempuan dengan peran domestiknya justru semakin dibebani sehingga memperkuat *triple burden of women*, dimana perempuan harus melakukan fungsi reproduksi, produksi dan fungsi sosial di masyarakat (Asmorowati, 2005). Keterkaitan penelitian ini dengan judul skripsi yang penulis angkat adalah sama-sama membahas program pemberdayaan perempuan di desa. Namun dalam penelitian ini hanya membahas tentang programnya saja tanpa mengevaluasi program tersebut, sehingga penyusun perlu untuk melengkapi.

*Keenam*, dalam jurnal yang ditulis oleh Retno Endah Supeni dan Maheni Ika Sari dengan judul “Upaya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Pengembangan Manajemen Usaha Kecil (Studi deskriptif pada Kegiatan Usaha Kecil Ibu-ibu Desa Wirolegi Kabupaten Jember, Dampingan Pusat Studi Wanita UM Jember)”. Data penelitian ini diperoleh melalui *focus group discussion (FGD)* dan wawancara mendalam dengan para informan. *Focus group discussion (FGD)* dilakukan terhadap ibu-ibu desa Wirolegi yang terbagi dalam tiga kelompok yakni kelompok yang belum pernah berwirausaha, pernah berwirausaha tapi gagal dan berwirausaha yang masih survive sampai sekarang. Beberapa program pemberdayaan ekonomi perempuan yang telah dilaksanakan PSW UM Jember selama kurun waktu empat tahun terakhir belum memberikan hasil yang optimal dalam upaya pemberdayaan ekonomi perempuan di desa Wirolegi meskipun sebenarnya geliat wirausaha bagi ibu-ibu rumah tangga sudah mulai ada namun masih perlu perhatian khusus dengan melakukan pendampingan dan pembinaan dalam rangka mengelola usaha-usaha mereka melalui pengembangan manajemen usaha kecil (Sari, 2011). Keterkaitan penelitian ini dengan judul skripsi yang penulis angkat adalah sama-sama membahas program



pemberdayaan perempuan di desa. Namun dalam penelitian ini hanya membahas tentang programnya saja tanpa mengevaluasi program tersebut.

*Ketujuh*, penelitian yang dilakukan Rachna Fauzia Nurhuda, Asep Ramdan Hidayat, dan Dudung Abdurrahman dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Paket Masa Depan Terhadap Kesejahteraan Nasabah Di BTPN Syariah MMS Bojong Soang”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan PMD yang terdapat di BTPN Syariah MMS Bojongsoang, Kondisi kesejahteraan nasabah penerima modal usaha dan pengaruh pembiayaan PMD terhadap tingkat kesejahteraan nasabah, didapatkan hasil pelaksanaan penyaluran pembiayaan PMD di BTPN Syariah MMS Bojongsoang sudah berjalan baik, dan pembiayaan PMD memiliki pengaruh terhadap tingkat kesejahteraan nasabahnya. Koefisien determinasi menunjukkan besar pengaruh antara variabel pelaksanaan strategi diferensiasi atau variabel X terhadap variabel peningkatan penerimaan dana zakat atau variabel Y yang diperoleh adalah 0.717. jadi dapat dikatakan bahwa kontribusi pelaksanaan penyaluran pembiayaan PMD yang dilakukan BTPN Syariah MMS Bojongsoang tingkat kesejahteraan nasabah adalah 71.7 % , hal ini menunjukkan tingkat pengaruh yang cukup tinggi (Rachna Fauzia Nurhuda, 2015). Keterkaitan penelitian ini dengan judul skripsi yang penulis angkat adalah sama-sama membahas program pemberdayaan perempuan di desa. Namun dalam penelitian ini hanya membahas tentang programnya saja tanpa mengevaluasi program tersebut.

*Kedelapan*, jurnal dengan judul “Analisis Pengembangan Usaha Mikro dalam Mendukung Pemberdayaan Perempuan di Pulau Bunaken, Kota Manado, Sulawesi Utara” yang ditulis oleh Tely Dasaluti, Aida Vitayala S Hubeis, dan Eko Sri wiyono menjelaskan bahwa strategi unggulan yang diperoleh dalam pengembangan usaha mikro dengan metode AHP menunjukkan bahwa diperoleh prioritas unggulan untuk tujuan pengembangan usaha mikro adalah peningkatan ekonomi keluarga, dengan rincian : a. Usaha mikro yang dijalankan dapat menjadi mata pencaharian tambahan bagi keluarga nelayan/warga masyarakat di Pulau Bunaken, b. Usaha yang dijalankan tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan teknologi, karena berperan dalam

meningkatkan mutu SDM pengusaha perempuan di pulau itu, c. semakin berdaya kaum perempuan di Pulau Bunaken, maka ekonomi keluarga akan semakin berdaya (Tely, 2010). Keterkaitan dengan skripsi yang penulis angkat adalah sama-sama membahas program untuk memberdayakan perempuan di desa. Namun dalam penelitian ini lebih kompleks dan memaparkan dengan jelas program-programnya. Perbedaannya penelitian ini tidak menyentuh ranah evaluasi program, sehingga penulis perlu melenhkapi penelitian ini karena evaluasi dirasa sebagai elemen yang penting dalam mengukur sejauh mana program tersebut berhasil.

*Kesembilan*, Dalam penelitian yang dilakukan Harsit Topno dengan judul “*Evaluation of Training and Development: An Analysis of Various Models*” Membahas evaluasi program *training* dan pengembangan pada karyawan. Dalam penelitiannya Harshit Tapno menggunakan berbagai macam model evaluasi guna mendapatkan hasil perbandingan yang akurat, diantaranya model evaluasi model Krirkpatrick, model CIPP, model CIRO, model Philip’s. Evaluasi pelatihan dan pengembangan berarti penilaian dampak pelatihan terhadap kinerja dan perilaku peserta pelatihan. Hasilnya didapatkan dari berbagai model evaluasi diharapkan terdapat berbagai perubahan dalam indikator utama dan berbagai tambahan topik sehingga kegiatan *training* dan pengembangan karyawan lebih efektif (Tapno, 2012). Keterkaitan dengan skripsi yang penulis angkat adalah penggunaan model evaluasi CIPP sebagai alat evaluasi program.

Dari hasil penelitian terdahulu bisa diambil kesimpulan bahwa setiap program pemberdayaan yang dilakukan lembaga keuangan memiliki hasil pemberdayaan yang sama yaitu perempuan . Yang membedakannya adalah pada lembaga keuangan dan cara yang digunakan. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis memberikan penyelesaian tidak hanya pada capaian pemberdayaan yang diinginkan tetapi juga bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan program dalam pendukung pencapaian pemberdayaan.

Untuk lebih memperjelas dalam memaparkan telaah pustaka, maka penyusun membuat ringkasan telaah pustaka dalam bentuk tabel 2.1, seperti di bawah ini:

**Tabel 2.1 Ringkasan Telaah Pustaka**

No	Penulis (Tahun, Publikasi)	Judul	Hasil
1	Rianti Pratiwi (2014, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah)	Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mendorong Usaha Kaum Perempuan	LKMSharus dapat berperan sebagai pusat pembelajaran bagi nasabahnya, yakni dengan memberikan pendampingan, baik dalam administrasi keuangan usaha, maupun mensosialisasikan pemahaman tentang ekonomi Islam, agar tujuan dai adanya pembiayaan mikro terhadap perempuan tidak menyimpang.
2	Mulia Astuti (2012, Sosiokonsepsia Volume 17 Nomor. 03)	Pemberdayaan Perempuan Miskin Berbasis Pemanfaatan Sumberdaya Lokal Melalui Pendekatan Sosial Entrepreneurship (Studi Kasus di Daerah Tertinggal, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat)	Model pemberdayaan perempuan miskin melalui pendekatan <i>social entrepreneurship</i> dapat diterapkan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan miskin, menciptakan lapangan kerja baru bagi perempuan dengan memanfaatkan potensi ikan lokal.
3	Evi Steelyana (2013, Journal The Winners)	Perempuan dan Perbankan: Sebuah Tinjauan	Program inklusi keuangan agar dapat dijalankan secara menyeluruh di Indonesia karena kurang dari setengah

	Volumr. 14 No. 2 September)	Tentang Peran Inklusi Keuangan Terhadap Pengusaha UMKM Perempuan Di Indonesia	jumlah penduduk memiliki akses terhadap jasa keuangan resmi. Dalam realisasinya dibutuhkan usaha bersama yang melibatkan Pemerintah, Pengatur Sektor Keuangan/Bank Indonesia, Sektor Perbankan, Sektor Keuangan dan Para mitra pembangun Indonesia.
4	Ninik Sri Rahayu (2015, Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan Volume. 04 Nomor. 02 September)	Kontribusi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Perempuan (Studi Khusus BMT di Kabupaten Sleman Yogyakarta)	Secara statistik terdapat perbedaan signifikan kontrol tabungan dan pendapatan usaha, pengambilan keputusan, mobilitas dan partisipasi antara perempuan yang menjadi anggota BMT dan nonBMT.
5	Sulikhah Asmorowati (2005, Ilmu Administrasi Negara FISIB Universitas Airlangga Surabaya)	Dampak Pemberian Kredit Mikro untuk Perempuan: Analisis Pengadopsian Model Grameen Bank di Indonesia	Program kredit mikro memfokuskan hanya pada problem perempuan untuk mengakses keuangan dan pendapatan keluarga, namun lupa untuk mempertimbangkan waktu perempuan terbatas untuk aktivitas domestik. Sehingga semakin memperkuat <i>triple burden of women</i> di masyarakat.
6	Retno Endah Supeni dan Maheni Eka Sari (2011, Seminar Nasional Ilmu Ekonomi Terapan,	Upaya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Pengembangan Manajemen Usaha Kecil(Studi	Beberapa program pemberdayaan ekonomi perempuan yang telah dilaksanakan PSW UM Jember selama kurun waktu empat tahun terakhir belum memberikan hasil yang optimal dalam upaya pemberdayaan ekonomi perempuan di desa Wirolegi meskipun sebenarnya geliat wirausaha bagi ibu-ibu rumah

	Fakultas Ekonomi UNIMUS)	diskriptif pada Kegiatan Usaha Kecil Ibu-ibu Desa Wirolegi Kabupaten Jember, Dampingan Pusat Studi Wanita UM Jember)	tangga sudah mulai ada namun masih perlu perhatian khusus dengan melakukan pendampingan dan pembinaan dalam rangkamengelola usaha-usaha mereka melalui pengembangan manajemen usaha kecil
7	Rachna Fauzia Nurhuda, Asep Ramdan Hidayat, dan Dudung Abdurrahman (2015, Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah ISSN: 2460-2159)	Pengaruh Pembiayaan Paket Masa Depan Terhadap Kesejahteraan Nasabah Di BTPN Syariah MMS Bojong Soang	Kesimpulan kontribusi pelaksanaan penyaluran pembiayaan PMD yang dilakukan BTPN Syariah MMS Bojongsoang tingkat kesejahteraan nasabah adalah 71.7 % , hal ini menunjukkan tingkat pengaruh yang cukup tinggi
8	Tely Dasaluti, Aida Vitayala S Hubeis, dan Eko Sri wiyono (2010, Manajemen IKM Volume 05 Nomor 02 Februari)	Analisis Pengembangan Usaha Mikro dalam Mendukung Pemberdayaan Perempuan di Pulau Bunakn, Kota Manado, Sulawesi Utara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil identifikasi jenis usaha di Pulau Bunaken ada 3 jenis usaha, yaitu pola mandiri, pola kelompok, dan pola kemitraan</li> <li>2. Strategi unggulan yang diperoleh dalam pengembangan usaha mikro dengan metode AHP menunjukkan bahwa diperoleh prioritas unggulan untuk tujuan pengembangan usaha mikro adalah peningkatan ekonomi keluarga,</li> </ol>
9	Harshit Tapno (2012, IOSR	<i>Evaluation of Training and</i>	Didapatkan dari berbagai model evaluasi diharapkan terdapat berbagai

	<i>Journal of Business and Management )</i>	<i>Development: An Analysis of Various Models</i>	perubahan dalam indikator utama dan berbagai tambahan topik sehingga kegiatan <i>training</i> dan pengembangan karyawan lebih efektif
--	---	---	---

*Sumber : Data diolah (2018)*

## **B. Landasan Teori**

### **1. Evaluasi**

Secara harfiah kata evaluasi berasal dari bahasa inggris *evaluation*; *al-Taqdir* (bahasa arab) yang berarti penilaian. Akar katanya adalah *Value*: dalam bahasa Arab; *al-Qimah* yang artinya nilai (Sudijono, 2011). Menurut Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin A.J, “Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan” (Jabar, 2004).

Menurut Daniel L. Stufflebeam (1973) dalam Zaenal Arifin (2009) menjelaskan evaluasi diartikan sebagai suatu proses medeskripsikan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan (Arifin, 2009). Menurut Zaenal Arifin, Evaluasi adalah suatu proses bukan suatu hasil (produk). Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah kualitas sesuatu, baik yang menyangkut tentang nilai atau arti, sedangkan kegiatan untuk sampai pada pemberian nilai dan arti itu adalah evaluasi (Arifin, 2009). Menurut M. Chabib Thoha, Evaluasi adalah kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur memperoleh kesimpulan (Toha, 1996).

Dari pendapat mengenai pengertian evaluasi beberapa ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa Evaluasi adalah suatu nilai atau instrumen yang digunakan untuk mengukur suatu program apakah program tersebut sudah sesuai dengan tujuan utamanya dengan menggunakan tolak ukur tertentu.

## 2. Model Evaluasi CIPP(*Context, Input, Process, Product*)

Model evaluasi CIPP(*Context, Input, Process, Product*) merupakan salah satu dari beberapa model evaluasi program yang ada. Model evaluasi CIPP dikembangkan oleh Stufflebeam dan kawan-kawan (1967) di *Ohio State University*. CIPP merupakan sebuah singkatan dari huruf awal empat buah dari beberapa dimensi, yaitu dimensi *context*, dimensi *input*, dimensi *proses*, dan dimensi produk (Jabar, 2004). Stufflebeam menjelaskan bahwa evaluasi model ini ditujukan untuk digunakan mengevaluasi berbagai macam program, termasuk semua bidang disiplin dan semua jenis layanan di dunia. Ditujukan untuk semua profesi baik *evaluators, administrator, praktisi, professors, mahasiswa, dan perusahaan* (Zhang, 2017)

Menurut Bernadette Robinson (2002) Evaluasi model ini bermaksud membandingkan kinerja dari berbagai dimensi program dengan sejumlah kriteria tertentu, untuk akhirnya sampai pada deskripsi dan *judgement* mengenai kekuatan dan kelemahan program yang dievaluasi.

Proses evaluasi ini tidak hanya berakhir dengan suatu *description* mengenai keadaan sistem yang bersangkutan, tetapi harus sampai pada *judgement* sebagai kesimpulan dari hasil evaluasi. Model ini menuntut agar hasil evaluasi digunakan sebagai *input* untuk *decision making* dalam rangka penyempurnaan sistem secara keseluruhan (Arifin, 2009).

### a. *Context evaluation to serve planning decision*

Evaluasi terhadap konteks adalah upaya untuk menggambarkan dan merinci lingkungan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, populasi dan sample yang dilayani, dan tujuan proyek. Dimana konteks evaluasi untuk membantu administrator merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan program, merumuskan tujuan program, lingkungan program, serta kekurangan dan kelebihan program (Arifin, 2009).

### b. *Input evaluation, structuring decision*

Menurut Stufflebeam pertanyaan yang berkenaan dengan masukan mengarah pada “pemecahan masalah” yang mendorong diselenggarakannya

program yang bersangkutan. Kegiatan evaluasi bertujuan untuk membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber, alternatif apa yang akan diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan, dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya (Arifin, 2009).

*c. Procces evaluation, to serve implemennting decision.*

Evaluasi terhadap proses dalam model CIPP menunjuk pada “apa” (*what*) kegiatan yang dilakukan dalam program, “siapa” (*who*) orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab program,”kapan” (*when*) kegiatan akan selesai. Evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan didalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana dan apa yang harus diperbaiki.

*d. Product evaluationto serve recycling decision*

Evaluasi produk atau hasil diarahkan pada hal-hal yang menunjukkan perubahan yang terjadi pada masukan mentah. Dapat diartikan evaluasi produk ini merupakan kegiatan mendaur ulang keputusan dalam suatu program. Pertanyaan yang harus dijawab yaitu adalah hasil yang telah dicapai dan apa yang harus dilakukan setelah program berjalan. Sehingga didapatkan keputusan apakah program akan terus berjalan, berakhir, atau ada keputusan yang lainnya.

Keempat kata yang disebutkan dalam singkatan CIPP tersebut merupakan sasaran evaluasi, yaitu tidak lain adalah komponen dari proses sebuah program kegiatan. Dengan kata lain, model CIPP adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem.

Menurut Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin (2004), model evaluasi CIPP dengan jelas menunjukkan sebuah proses dalam program, sehingga model evaluasi CIPP tepat dan cocok diterapkan untk mengevaluasi program layanan seperti halnya program koperasi dan perbankan(Jabar, 2004).

### **3. Bank Syariah**

Kata bank dari kata *banque* dalam bahasa Prancis, dan dari *banco* dalam bahasa Italia, yang berarti peti/lemari atau bangku yang menisyratkan



fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya. Dalam Al-Qur'an, istilah bank tidak disebutkan secara eksplisit. Tetapi struktur, manajemen, fungsi, hak, dan kewajiban maka semua itu disebutkan dengan jelas, seperti zakat shadaqah, *ghanimah* (rampasan perang), *bai'* (jual beli), *dayn* (hutang dagang), *mall* (harta) dan sebagainya, yang memiliki fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi (Sudarsono, 2007, hal. 27).

Sebagian orang masih beranggapan bahwa Bank Konvensional dan Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang memiliki fungsi dan tugas yang sama. Akan tetapi pada dasarnya dalam melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana Bank Syariah berdasarkan prinsip syariah Islam yang sesuai dengan al-Qur'an dan Hadist.

Menurut Sudarsono (2007), "Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah (Sudarsono, 2007).

#### **4. Pembiayaan (*Financing*)**

Solihin (2010) menyatakan pengertian pembiayaan menurut Kamus Pintar Ekonomi Syariah adalah sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) transaksi bagi hail dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; (b) transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bit tamlik*; (c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istish'na*; (d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qardh*; dan (e) transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi-jasa; berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah serta atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil (Asiyah, 2015, hal. 1-2).

Menurut Aisyah (2015), “Pembiayaan merupakan fungsi intermediasi bank, dimana menyalurkan dana ke masyarakat berupa pembiayaan yang diperoleh dari dana deposito masyarakat (Asiyah, 2015, hal. 2).

#### **Fungsi Pembiayaan :**

Menurut Muchdarsyah (1983) dalam Muhammad (2005), ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, diantaranya :

- 1) Meningkatkan daya guna uang  
Dana yang mengendap di bank (dana pihak ketiga) tidaklah idle (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik bagi pengusaha maupun masyarakat.
- 2) Meningkatkan daya guna barang  
Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* bahan meningkat.
- 3) Meningkatkan peredaran uang  
Pembiayaan yang disalurkan via rekening koran pengusaha menciptakan peredaran uang giral dan sebagainya.
- 4) Menimbulkan kegairahan berusaha  
Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian yang digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitas, masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan modal.
- 5) Stabilitas ekonomi  
Untuk menekan arus inflasi dan untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting.
- 6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional
- 7) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

#### **Jenis-Jenis Pembiayaan Bank Syariah**

Adiwarman Karim (2006) membagi jenis pembiayaan syariah menjadi 5 macam, yaitu :

#### 1) Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Berdasarkan akad dalam pembiayaan syariah, jenis pembiayaan modal kerja (PMK) dibagi menjadi 5 macam, yakni:

- a) PMK *Mudharabah*
- b) PMK *Musyarakah*
- c) PMK *Istishna'*
- d) PMK *Salam*
- e) PMK *Murabahah*
- f) PMK *Ijarah*

#### 2) Pembiayaan Investasi Syariah

Berdasarkan akad dalam pembiayaan syariah, jenis pembiayaan investasi dibagi menjadi 3 macam, yakni:

- a) PI *Murabahah*
- b) PI *IMBT*
- c) PI *Salam*
- d) PI *Istishna*

#### 3) Pembiayaan Konsumtif Syariah

Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dibagi menjadi 5 bagian, yaitu:

- a) Pembiayaan Konsumen Akad *Murabahah*
- b) Pembiayaan Konsumen Akad *IMBT*
- c) Pembiayaan Konsumen Akad *Ijarah*
- d) Pembiayaan Konsumen Akad *Istishna'*
- e) Pembiayaan Konsumen Akad *Qard+ Ijarah*

#### 4) Pembiayaan Sindikasi

Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan Sindikasi bank syariah menggunakan akad *Musyarakah*.

5) Pembiayaan berdasarkan *Take Over*

Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan *Take Over* dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

- a) Pembiayaan *take over* akad *Hiwalah*
- b) Pembiayaan *take over* akad *Qard*
- c) Pembiayaan *take over* akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

6) Pembiayaan *Letter of Credit (L/C)*

a) Pembiayaan L/C Impor

Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 34/DSN-MUI/IX/2002, akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan L/C Impor adalah :

- i. *Wakalah bil Ujrah*
- ii. *Wakalah bil Ujrah* dengan *Qardh*
- iii. *Murabahah*
- iv. *Salam* atau *Istishna* dan *Murabahah*
- v. *Wakalah bil Ujrah* dan *Mudharabah*
- vi. *Musyarakah*
- vii. *Wakalah bil Ujrah* dan *Hawalah*

b) Pembiayaan L/C Ekspor

Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 34/DSN-MUI/IX/2002, akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan L/C Impor adalah :

- i. *Wakalah bil Ujrah*
- ii. *Wakalah bil Ujrah* dan *Qardh*
- iii. *Wakalah bil Ujrah* dan *Mudharabah*
- iv. *Musyarakah*
- v. *Ba'i* dan *Wakalah*

## 5. Pemberdayaan Perempuan

Menurut Merriam Webster dan *Oxford English Dictionary* (dalam Prijono dan Pranarka, 1996 : 3) yang dikutip oleh Kaswinata, 2013. Kata

“*empowerment*” dan “*empower*” diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi pemberdayaan dan memberdayakan, mengandung dua pengertian yaitu : pengertian pertama *adalah to give power or authority to, dan pengertian kedua berarti to give ability to or enable*. Dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedang dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan (Kaswinata, 2013)

Menurut Sumodiningrat, dalam Dea Hilyatul Aulia, 2014 bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang diberdayakan (Auliya, 2014)

Dubois dan Miley dalam (Nugroho, 2007) yang dikutip oleh Randy R.W dan Riant Nugroho, mengemukakan bahwa dasar-dasar pemberdayaan antara lain meliputi :

- 1) Pemberdayaan adalah proses kerjasama antara klien dan pelaksana kerja secara bersama-sama yang bersifat *mutual benefit*.
- 2) Proses pemberdayaan memandang sistem klien sebagai komponen dan kemampuan yang memberikan jalan ke sumber penghasilan dan memberikan kesempatan.
- 3) Pemberdayaan meliputi jalan ke sumber-sumber penghasilan dan kapasitas untuk menggunakan sumber-sumber pendapatan tersebut dengan cara efektif.
- 4) Proses pemberdayaan adalah masalah yang dinamis, sinergis, pernah berubah, dan evolusioner yang selalu memiliki banyak potensi.

Pemberdayaan perempuan berdasarkan Analisis Gender Suharto (2005) dalam Sumarti (2008) yang dikutip oleh Kaswinata, 2013 bahwa pemberdayaan merupakan bentuk tindakan kolektif yang berfokus pada upaya

menolong anggota masyarakat (khususnya golongan yang tidak beruntung/tertindas baik oleh kemiskinan maupun diskriminasi kelas sosial, gender) yang memiliki kesamaan minat untuk bekerjasama, mengidentifikasi kebutuhan bersama, dan kemudian melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan. Lebih lanjut, Suharto (2005) dalam Sumarti (2008) menyimpulkan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah kegiatan memperkuat kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial, yaitu masyarakat menjadi berdaya (Kaswinata, 2013).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan perempuan bukanlah sekedar upaya menjadikan perempuan menjadi berdaya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, melainkan suatu rangkaian proses dalam upaya meningkatkan kemampuan perempuan dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan, serta memiliki kesempatan dan status yang setara dengan laki-laki dalam berbagai bidang.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian evaluasi (*Evaluation reseach*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk merumuskan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, agar diperoleh umpan-balik (*feed back*) bagi perbaikan perencanaan sistem dan metode-metode kerja yang telah dilakukannya. Penelitian ini cenderung bersifat mengklarifikasi antara perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan (Supardi, 2005, hal. 26) Dalam hal ini penelitian terhadap para nasabah program PMD yang melakukan pembiayaan di BTPN Syariah MMS Eromoko.

Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif (*Descriptive Reserch*), penelitian ini dilakukan pada taraf atau kadar kajian dan analisis semata-mata ingin mengungkapkan suatu gejala/pertanda dan keadaan sebagaimana adanya. Pada penelitian ini kegiatan yang dilakukan mencari data untuk dapat menggambarkan atau mencandra secara faktual suatu peristiwa atau suatu gejala secara “apa adanya”(Supardi, 2005, hal. 28). Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (J.Moleong, 2007, hal. 6). Dalam penelitian ini yang diteliti adalah program pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) BTPN Syariah.

#### **B. Lokasi , Waktu dan Obyek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di kantor BTPN Syariah MMS Eromoko, Wonogiri-Jawa Tengah yang berlokasi di Dusun Sengon Rt 002/Rw 001, Eromoko, Wonogiri.

Sementara pelaksanaan penelitian sejak bulan Juni tahun 2018 hingga Juli tahun 2018 dan disini peneliti memilih objek penelitian di salah satu lembaga keuangan yaitu Bank Syariah. Penyusun melakukan penelitian di kantor cabang BTPN Syariah MMS Eromoko, Jawa Tengah dengan responden nasabah program pembiayaan Paket Masa Depan daerah Eromoko, Wonogiri, Jawa Tengah.

### **C. Populasi dan Sampel**

#### **1. Populasi Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah program PMD di BTPN Syariah MMS Eromoko, Wonogiri, Jawa Tengah dari berbagai kalangan dengan jumlah 525 nasabah.

#### **2. Sampel Penelitian**

Sebagai respondennya adalah ibu-ibu para anggota yang tergabung pada program Paket Masa Depan (PMD) khususnya masyarakat daerah Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah sejumlah 15 nasabah. Bentuk pengambilannya menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2011, hal. 54).

Dalam penelitian ini penulis menentukan responden dengan kriteria nasabah pembiayaan program PMD BTPN syariah telah melakukan minimal dua kali pembiayaan.

### **D. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### **1. Data Primer**

Data Primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Data primer ini didapat melalui observasi dan wawancara, hal ini dilakukan agar penulis memperoleh data lapangan/empiris untuk memecahkan masalah penelitian (Waluya, 2004).

- a. Observasi, mengamati langsung ke lokasi penelitian di BTPN Syariah MMS Eromoko, Wonogiri, Jawa Tengah



- b. Wawancara, dengan mewawancarai pihak-pihak yang terkait dalam program PMD baik nasabah maupun karyawan BTPN Syariah.
2. Data Sekunder
    - a. Dokumentasi dari data atau arsip yang berhubungan dengan penelitian, dan penulis memperoleh data ini dari kantor cabang BTPN Syariah MMS Eromoko, Wonogiri, Jawa Tengah.
    - b. Penelitian kepustakaan (*library research*) dari buku, artikel, karya ilmiah ataupun dari internet yang berkaitan dengan materi.

### **E. Teknik pengumpulan data**

Peneliti mengumpulkan data-data dalam skripsi ini dengan berbagai metode, diantaranya yaitu:

1. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu seperti bahan bacaan, buku, jurnal, dan lain sebagainya. Dalam hal ini data atau bahan yang dikumpulkan berupa data tertulis yang berkaitan dengan Bank BTPN Syariah.

2. Metode Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bentuk alat evaluasi jenis non-tes yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab, baik langsung maupun tidak langsung. Wawancara langsung adalah wawancara yang dilakukan secara langsung antara pewawancara (*interviewer*) dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*) tanpa melalui perantara, sedangkan wawancara tidak langsung artinya pewawancara menanyakan sesuatu kepada orang yang diwawancarai melalui perantara orang lain atau media, dengan tidak menemui langsung kepada sumbernya (Arifin, 2009). Dalam penelitian ini penulis membuat pertanyaan secara bebas dan tidak terikat. Penulis mewawancarai karyawan dan nasabah Bank BTPN Syariah yang terkait dengan program Paket Masa Depan.

### 3. Metode Observasi

Observasi merupakan suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai beberapa fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan utama observasi adalah (1) untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai suatu fenomena, (2) untuk mengukur perilaku kelas. Observasi tidak hanya digunakan dalam kegiatan evaluasi, tetapi juga dalam bidang penelitian kualitatif (*qualitative reaserch*)(Arifin, 2009).

### F. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

Untuk lebih memperjelas dalam memaparkan Definisi konseptual dan operasional, maka penulis sajikan dalam bentuk tabel, seperti di bawah ini:

**Tabel 3.1 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional**

No	Variabel	Definisi Konseptual	Definisi Operasional	Indikator
1	Model Evaluasi CIPP	Bernandette Robinson (2002), Evaluasi model ini bermaksud membandingkan kinerja dari berbagai dimensi program dengan sejumlah kriteria tertentu, untuk akhirnya sampai pada deskripsi dan <i>judgement</i> mengenai kekuatan dan kelemahan program yang dievaluasi.	1. Evaluasi <i>Context</i> fokus pada keputusan yang terencana (apa yang harus dilakukan). 2. Evaluasi <i>Input</i> fokus pada keputusan terstruktur mengenai bagaimana melakukannya. 3. Evaluasi <i>Process</i> fokus pada implementasi/apa yang dilakukan. 4. Evaluasi <i>Product</i> fokus pada keberhasilan	1. Evaluasi 2. Kegiatan membandingkan 3. Kekuatan dan kelemahan program

			program/keputusan .	
3	Program PMD	Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) adalah salah satu produk penyaluran dana bagi usaha mikro kecil menengah yang menggunakan akad <i>wakalah wal murabahah</i> dari PT. BTPN Syariah.	Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) adalah salah satu produk penyaluran dana bagi usaha mikro kecil menengah yang menggunakan akad <i>wakalah wal murabahah</i> dari PT. BTPN Syariah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suatu produk</li> <li>2. Penyaluran dana</li> </ol>
2	Pemberdayaan Masyarakat	<p>Gender Suharto (2005).</p> <p>Pemberdayaan merupakan bentuk tindakan kolektif yang berfokus pada upaya menolong anggota masyarakat (khususnya golongan yang tidak beruntung/tertindas baik oleh kemiskinan maupun diskriminasi kelas sosial, gender) yang memiliki kesamaan minat untuk bekerjasama, mengidentifikasi kebutuhan bersama, dan kemudian melakukan kegiatan</p>	<p>Gender Suharto (2005).</p> <p>Pemberdayaan merupakan bentuk tindakan kolektif yang berfokus pada upaya menolong anggota masyarakat (khususnya golongan yang tidak beruntung/tertindas baik oleh kemiskinan maupun diskriminasi kelas sosial, gender) yang memiliki kesamaan minat untuk bekerjasama, mengidentifikasi kebutuhan bersama, dan kemudian melakukan kegiatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tindakan kolektif</li> <li>2. Upaya menolong</li> <li>3. Mengidentifikasi kebutuhan</li> </ol>

		bersama untuk memenuhi kebutuhan.	bersama untuk memenuhi kebutuhan.	
--	--	-----------------------------------	-----------------------------------	--

*Sumber : Data diolah (2018)*

### G. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini instrumen yang dibuat, yaitu evaluasi terhadap program Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) BTPN Syariah MMS Eromoko dalam bentuk wawancara dan berdasarkan pada hasil dokumentasi atau studi kepustakaan, dan melakukan observasi untuk mengamati dan berpartisipasi secara langsung mengenai penelitian penulis.

Untuk lebih jelasnya mengenai instrumen penelitian yang digunakan peneliti, disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.2 Instrumen Penelitian**

No	Teknik Pengambilan Data	Instrumen
1	Wawancara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Draft</i> Wawancara</li> <li>2. Buku catatan</li> <li>3. Alat perekam</li> <li>4. Bolpoin</li> </ol>
2	Observasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Check-list</i></li> <li>2. Bolpoin</li> </ol>
3	Dokumntasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kamera</li> <li>2. Alat perekam</li> </ol>

*Sumber : Data diolah (2018)*

### H. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasi data kedalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2008, hal. 89).

Dalam penelitian ini, dilakukan analisa dengan analisa deskriptif kualitatif dengan menggunakan model Miles *and* Huberman. Miles *and* Huberman , mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2008, hal. 91). Dalam model Miles and Huberman terdapat empat aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi).

#### 1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti yang telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2011, hal. 92).

#### 2. *Data Display* (penyajian data).

Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Menurut Miles and Huberman (1984), yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart*(Sugiyono, 2011, hal. 95).

#### 3. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah selanjutnya dalam analisis data menurut Miles and Huberman adalah *conclusion drawing/verification* atau penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis, atau teori (Sugiyono, 2011, hal. 99).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penyusun akan menjelaskan dan membahas hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan di BTPN Syariah MMS Eromoko dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

#### **A. Paparan Data Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat BTPN Syariah**

BTPN Syariah merupakan anak perusahaan BTPN, dengan kepemilikan saham 70% dan merupakan Bank Syariah ke 12 di Indonesia. Beroperasi berdasarkan prinsip inklusi keuangan dengan menyediakan produk dan jasa keuangan kepada masyarakat terpendek yang belum terjangkau serta segmen masyarakat pra sejahtera. Selain menyediakan akses layanan keuangan kepada masyarakat.

Pada awalnya PT BTPN Syariah Tbk didirikan dengan nama PT Bank Purba Danarta (BPD) yang berpusat di Semarang berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tanggal 7 Maret 1991 dengan lisensi bank non-devisa. Bank BTPN kemudian mengakuisisi 70% saham di Bank Sahabat pada 30 Januari 2014 dan mengkonversinya menjadi Bank Syariah berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 22 Mei 2014. Unit Usaha Syariah di BTPN, yang dibentuk pada Maret 2008, *spin-off* ke Bank Syariah yang baru pada Juli 2014(www.btpn, 2018).

##### **2. Visi dan Misi BTPN Syariah**

Visi dan misi BTPN Syariah menjadi arah, tujuan dan komitmen BTPN Syariah dalam memberikan kesempatan tumbuh bagi jutaan rakyat Indonesia.

###### **a. Visi**

“Menjadi Bank Syariah terbaik, untuk keuangan inklusif, Mengubah Hidup Berjuta Rakyat Indonesia”.

## b. Misi

“Bersama Kita Ciptakan Kesempatan Tumbuh dan Hidup yang Lebih Berarti”

**Bersama** artinya dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) tanpa terkecuali.

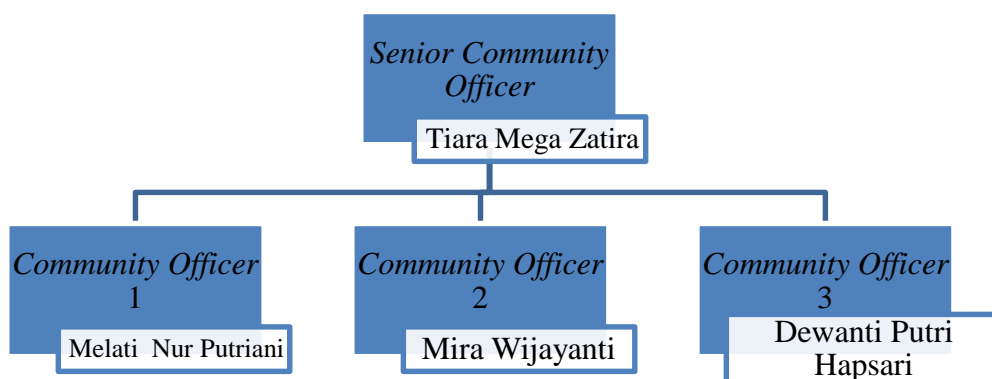
**Kita Ciptakan Kesempatan** artinya artinya mengupayakan untuk menjadikan segala aktivitas yang di lakukan di BTPN Syariah adalah sebuah kesempatan untuk tumbuh.

**Tumbuh** bermakna semua kesempatan yang ada harus mampu membawa perubahan untuk setiap *stakeholders* ke arah yang lebih baik.

**Hidup yang Lebih Berarti** artinya seluruh *stakeholders* BTPN Syariah yang telah tumbuh, diharapkan mampu memberikan manfaat bagi sekitarnya(www.btpnsyariah, 2018).

### 3. Struktur Organisasi BTPN Syariah MMS Eromoko

Dibawah ini adalah struktur organisasi Bank BTPN Syariah MMS Eromoko:



**Gambar 4.1 Struktur Organisasi BTPN Syariah MMS Eromoko**

Sumber : (Tiara, 2018)



#### 4. Produk BTPN Syariah

BTPN Syariah selaku bank baru terus berupaya menyediakan produk-produk unggulan dengan mengedepankan pemenuhan kebutuhan nasabah untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Fokus pada pemberdayaan nasabah pra-sejahtera produktif, BTPN Syariah memiliki dua produk utama yaitu pendanaan dan pembiayaan(www.btpnsyariah, 2018).

##### a. Pendanaan

Produk pendanaan memberikan kesempatan kepada Nasabah untuk menumbuhkan jutaan rakyat Indonesia. Berikut beberapa produk pendanaan unggulan BTPN Syariah :

##### 1) Tabungan Citra iB

Tabungan Citra iB adalah tabungan dengan setoran awal yang ringan, melalui perjanjian bagi hasil ( akad *Mudharabah Mutlaqah*), bebas melakukan penarikan kapan saja, tarik tunai tanpa batas penarikan di cabang bank, bebas biaya administrasi bulanan, dan imbah hasil/nisbah sebesar 3,30 : 96,70.

##### 2) Tabungan Taseto iB

Tabungan Taseto iB merupakan tabungan dengan imbal hasil optimal, tabungan yang dikelola berdasarkan perjanjian bagi hasil (akad *Mudharabah Mutlaqah*) ini mendapatkan keleluasaan melakukan penarikan tunai tanpa batas dan bebas biaya administrasi bulanan dengan setoran awal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

##### 3) Deposito iB

Deposito Berjangka iB adalah Deposito dengan pilihan jangka waktu sesuai kebutuhan nasabah. Penempatan deposito dilakukan berdasarkan perjanjian bagi hasil (akad *Mudharabah Mutlaqah*) antara *Mudharib* dengan *Shahibul Mall* dengan jangka waktu yang bervariasi mulai dari 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,18, dan 24 bulan. Minimum nominal penempatan deposit iB sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Manfaat Deposit iB yaitu nasabah mendapat imbal hasil yang kompetitif., mendapatkan layanan *personal banker* di cabang tertentu, bersifat aman karena dijamin dengan reputasi dan kinerja unggul berkelanjutan BTPN Syariah.

#### 4) Giro iB

Giro iB merupakan produk penempatan dana menggunakan akad *WadiahYad Al-Dhamanah*, memberikan fleksibilitas bagi nasabah untuk bertransaksi menggunakan Cek/*Bilyet* Giro. Setoran awal Giro iB sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Manfaat dari Giro iB yaitu bersifat fleksibel dengan memberikan kemudahan dalam bertransaksi, mendapatkan layanan eksklusif dari personal Banker di cabang tertentu dan aman karena reputasi dan kinerja unggul berkelanjutan BTPN Syariah adalah jaminan bagi nasabah.

#### 5) Tasepo Mapan iB

Tasepo Masa Depan iB merupakan produk simpanan berjangka yang menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah*, dengan berbagai keuntungan antara lain setoran awal yang ringan dan bagi hasil yang kompetitif, bebas biaya administrasi dan setoran bulanan menggunakan sistem *autodebet* dari rekening tabungan BTPN Syariah.

### b. Pembiayaan

Produk program pembiayaan di BTPN Syariah yaitu Paket Masa Depan (PMD) . Paket Masa Depan (PMD) merupakan program terpadu BTPN Syariah yang diberikan kepada sekelompok wanita di pedesaan yang ingin berusaha tetapi tidak memiliki akses ke layanan perbankan. Produk PMD menawarkan beberapa manfaat kepada nasabah yang terdiri dari : Pembiayaan; Tabungan dan Manfaat Asuransi. PMD memberikan fasilitas pembiayaan senilai Rp 1-50 juta yang akan dibayarkan melalui cicilan setiap 2 minggu dalam waktu satu tahun. Nasabah diwajibkan untuk memiliki tabungan selama masa pembiayaan dengan akad *wadiah* sebagai bentuk komitmen serta edukasi budaya menabung bagi nasabah PMD. Setiap nasabah PMD juga dilindungi dengan manfaat asuransi.

Program pembiayaan PMD mencakup 4 (empat) elemen yakni : memberikan solusi keuangan, perencanaan keuangan sederhana, partisipasi kelompok dan melibatkan karyawan BTPN untuk bertindak sebagai fasilitator dan menjadi teladan bagi nasabah BTPN Syariah.

### 5. Deskripsi Responden

Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2011, hal. 54). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah nasabah program pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) BTPN Syariah MMS Eromoko dengan kriteria telah menjalankan minimal dua kali pembiayaan sejumlah 15 nasabah. Proses wawancara dilakukan dari tanggal 29 Juni s/d 6 Juli 2018. Responden dalam penelitian ini yaitu nasabah program pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) BTPN Syariah MMS Eromoko ditetapkan berjumlah 15 nasabah.

Adapun karakteristik masing-masing responden yaitu : nama, pendidikan, usia, jenis usaha, pekerjaan suami, plafond pembiayaan. Data ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan responden sehingga peneliti mudah dalam mendapatkan informasi dan memahami hasil penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian kepada 15 orang responden melalui wawancara diperoleh gambaran identitas responden sebagai berikut :

**Tabel 4.1 Gambaran Identitas responden.**

No	Nama	Identitas Responden					
		Usia	Pendidikan	Jenis Usaha	Pekerjaan Suami	Plafond pembiayaan	Lama Pembiayaan
1	Desi Saputri	25	SMK	Pedagang Pakaian	Wiraswasta	3 jt	1 tahun
2	Sukini	44	SD	Pedagang Snack di pasar	Wiraswasta	7 jt	1,5 tahun
3	Sularmi	57	SMP	Petani dan pedagang	Petani	7 jt	1,5 tahun

				sayur dipasar			
4	Sutarmi	49	SMA	Pedagang sembako dan pakaian	Tukang Bangunan	3 jt	1,5 tahun
5	Patmi Lestari	34	SMP	Pedagang Jamu	Petani	7 jt	1,5 tahun
6	Juweti	30	SMP	Petani	Buruh serabutan	4 jt	1,5 tahun
7	Puji Lestari	37	SMA	Petani	Petani	5 jt	1,5 tahun
8	Sri Susanti	23	SMP	Peternak lele	Wiraswasta	7 jt	1,5 tahun
9	Dwi Astuti	31	SMK	Peternak lele	Buruh	4 jt	1,5 tahun
10	Parmi	52	SMP	Petani	Petani	6	1,5 tahun
11	Yuli	39	SMA	Petani	Buruh	7 jt	1,5 tahun
12	Sri Sutarsi	47	SMP	Pedagang Jamu	Buruh	5 jt	1 tahun
13	Daryati	41	SMP	Pedagang emas	Pedagang Emas	6 jt	1,5 tahun
14	Setiyani	29	SD	Petani	Petani	4 jt	1 tahun
15	Suswanti	34	SMP	Petani	Petani	2 jt	1 tahun

*Sumber : Data diolah (2018)*

a. Umur

Identitas responden berdasarkan umur menggambarkan tingkat pengalaman dan pola pikir responden. Adapun tabel identitas responden berdasarkan umur yaitu :

**Tabel 4.2 Identitas Umur Responden**

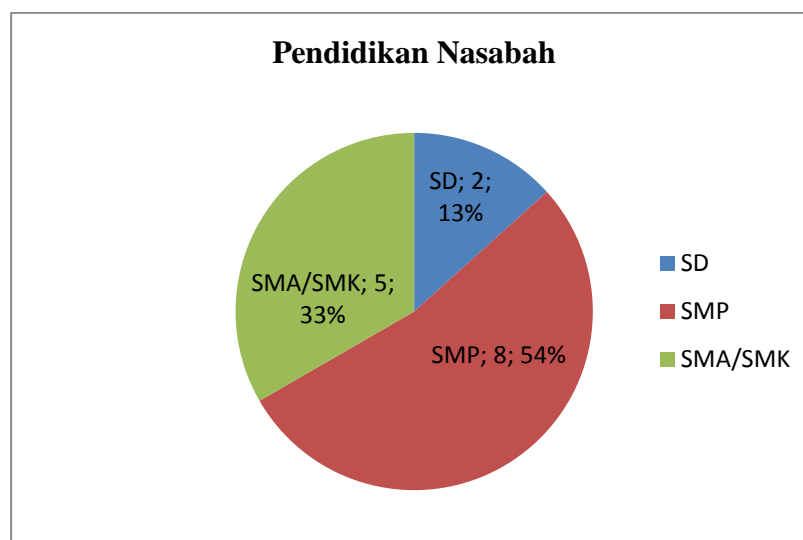
Umur (tahun)	Responden	Jumlah	Presentase (%)
20-30		4	27
31-40		5	33
41-50		4	27
51-60		2	13
<b>Total</b>		<b>15</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Data diolah (2018)*

Dari tabel diatas menunjukkan umur nasabah program pembiayaan PMD yang menjadi responden adalah umur 20-30 tahun sebanyak 4 atau 27%, umur 31-40 tahun sebanyak 5 atau 33%, umur 41-50 sebanyak 2 atau 27%, dan umur 51-60 tahun sebanyak 2 atau 13 %. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian responden di umur 31-40 tahun sebanyak 5 atau 33%.

b. Pendidikan

Identitas responden berdasarkan pendidikan terakhir nasabah program pembiayaan PMD BTPN Syariah MMS Eromoko adalah sebagai berikut :



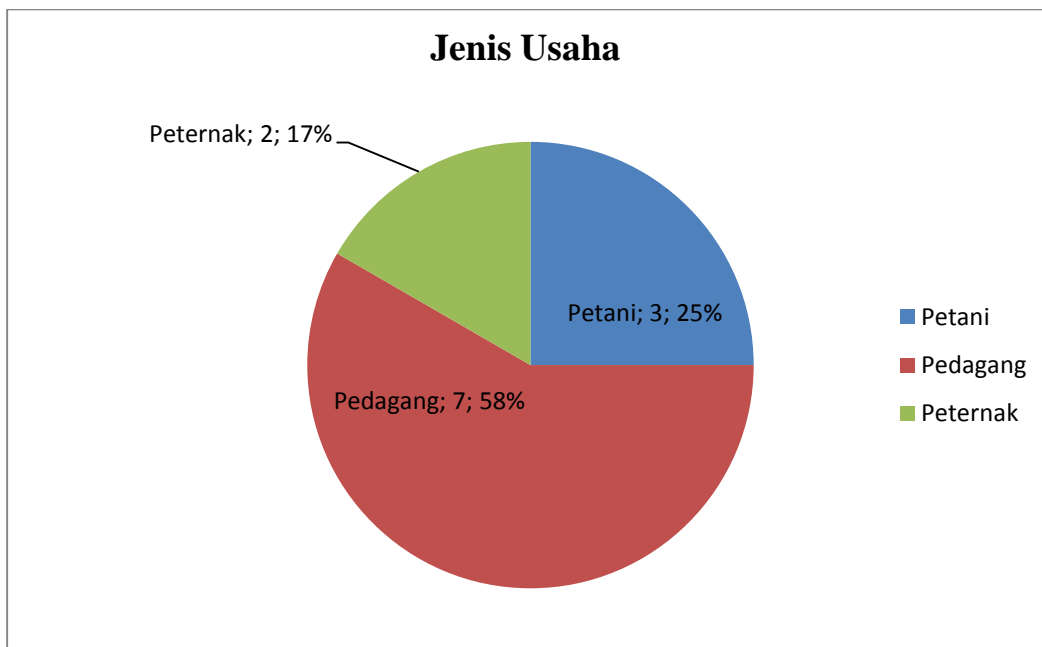
**Gambar 4.2 Pendidikan terakhir responden.**

*Sumber : data diolah (2018)*

Dari diagram diatas menunjukkan pendidikan terakhir nasabah program pembiayaan PMD yang menjadi responden adalah SD sebanyak 2 atau 13 %, SMP sebanyak 8 atau 54%, dan SMA sebanyak 5 atau 33 %.. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian responden pada pendidikan SMP sebanyak 8 atau 54%.

c. Jenis Usaha

Identitas responden berdasarkan jenis usaha menggambarkan tingkat pendapatan nasabah dari penyaluran dana pembiayaan. Adapun gambaran identitas responden berdasarkan jenis usaha yaitu :



**Gambar 4.3 Diagram identitas jenis usaha responden**

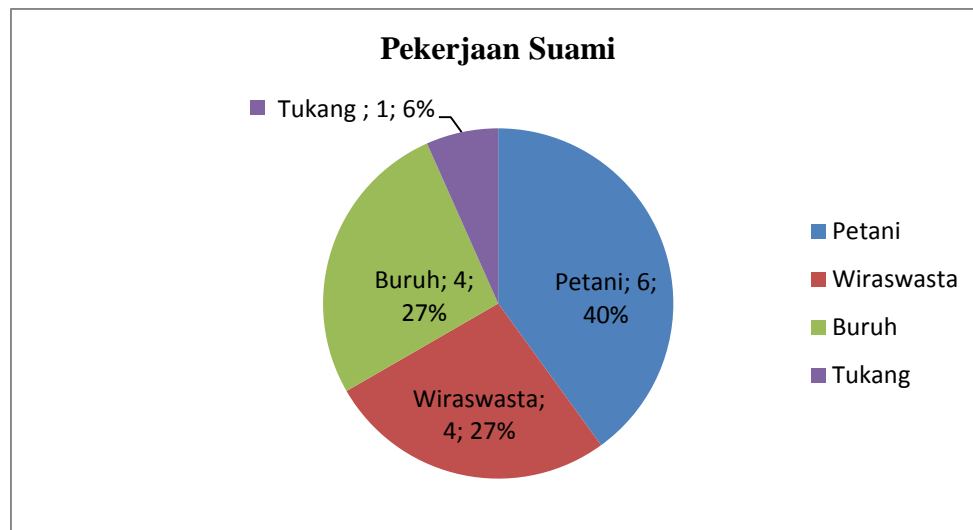
*Sumber : Data diolah (2018)*

Dari diagram diatas menunjukkan bahwa jenis usaha nasabah program pembiayaan PMD yang menjadi responden adalah petani sebanyak 6 atau 40%, pedagang sebanyak 7 atau 47 %, dan ternak sebanyak 2 atau 13%. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian responden pada jenis usaha yaitu pedagang sebanyak 7 atau 47 %.

d. Pekerjaan Suami

Identitas responden berdasarkan pekerjaan suami menunjukkan tinggi usaha yang dilakukan nasabah mandiri atau dikelola bersama suami dan

menjadi tolak ukur pemberdayaan.. Adapun gambaran identitas responden berdasarkan pekerjaan suami yaitu :



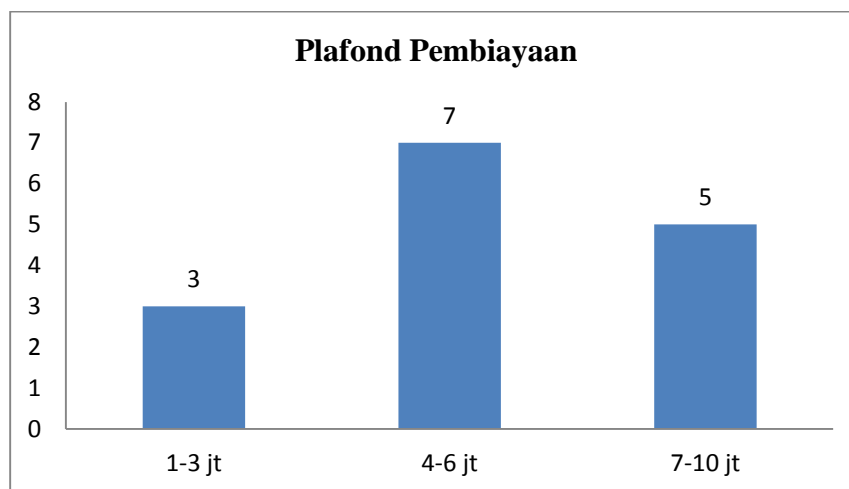
**Gambar 4.4 Diagram identitas pekerjaan suami responden**

*Sumber : Data diolah (2018)*

Dari diagram diatas menunjukkan bahwa pekerjaan suami nasabah program pembiayaan PMD yang menjadi responden adalah petani sebanyak 6 atau 40%, wiraswasta sebanyak 4 atau 27 %, buruh sebanyak 4 atau 27%, dan Tukang sebanyak 1 atau 6%. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian responden pada pekerjaan suami petani sebanyak 6 atau 40%.

#### e. Plafond Pembiayaan

Identitas responden berdasarkan plafond pembiayaan menunjukkan tingginya tanggung jawab nasabah terhadap bank. Adapun gambaran identitas responden berdasarkan plafond pembiayaan yaitu :



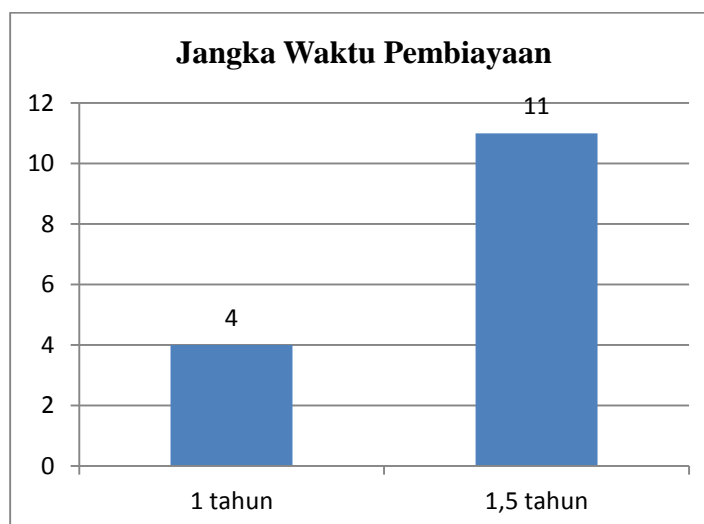
**Gambar 4.5** Grafik plafond pembiayaan responden

*Sumber : Data diolah (2018)*

Dari diagram diatas menunjukkan bahwa plafond pembiayaan nasabah program pembiayaan PMD yang menjadi responden adalah 1-3 juta sebanyak 3, 4-6 juta sebanyak 7, dan 7-10 juta sebanyak 5. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian responden pada plafond pembiayaan yaitu pembiayaan 4-6 juta sebanyak 7 responden.

f. Jangka Waktu Pembiayaan

Identitas responden berdasarkan jangka waktu pembiayaan adalah sebagai berikut :



**Gambar 4.6** Grafik jangka waktu pembiayaan

*Sumber : Data diolah (2018)*



Dari diagram diatas menunjukkan bahwa jangka waktu pembiayaan nasabah program pembiayaan PMD yang menjadi responden adalah 1 tahun sebanyak 4 responden dan 1,5 tahun sebanyak 11 responden. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian responden pada jagka waktu pembiayaan adalah 1,5 tahun sebanyak 11 responden.

## **B. Hasil Analisis Data Penelitian**

Evaluasi yang dilakukan penulis terhadap program pembiayaan PMD di BTPN Syariah MMS Eromoko menggunakan model evaluasi CIPP yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Model evaluasi CIPP terdiri dari 4 dimensi evaluasi , yaitu *Context, Input, Process, Product*. Menurut Bernandette Robinson (2002) Evaluasi CIPP ini bermaksud membandingkan kinerja dari berbagai dimensi program dengan sejumlah kriteria tertentu, untuk akhirnya sampai pada deskripsi dan *judgement* mengenai kekuatan dan kelemahan program yang dievaluasi.

### **1. Evaluasi terhadap *Context***

Evaluasi terhadap context digunakan untuk mengetahui gambaran, rincian lingkungan program, tujuan, populasi sample yang dilayani dan kebutuhan yang belum terpenuhi dari program pembiayaan Paket Masa Depan (PMD).

Adapun hasil evaluasi *context* terhadap program pembiayaan PMD di BTPN Syariah MMS Eromoko adalah:

#### **a. Gambaran Umum Program Pemberdayaan PMD**

Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) adalah salah satu produk penyaluran dana bagi usaha mikro kecil menengah yang menggunakan akad *wakalah wal murabahah* dari PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah, produk pembiayaan ini diberikan kepada sekelompok wanita baik yang belum menikah maupun yang sudah/pernah menikah dari keluarga pra sejahtera dan cukup sejahtera di pedesaan yang memiliki usaha untuk dikembangkan maupun bagi yang belum memiliki usaha tetapi mempunyai tekad untuk berusaha membangun dan menumbuhkan usaha yang

tidak memiliki akses dan jaminan kepada bank(www.btpnsyariah, BTPN Syariah, 2018)

Paket Masa Depan (PMD) memberikan fasilitas pembiayaan senilai Rp 1- 50 juta yang dibayarkan melalui cicilan setiap dua minggu dalam waktu satu tahun. Di akhir periode nasabah dengan *track record* bagus selama masa pembiayaan, dalam artian nasabah membayar angsuran tepat waktu dapat mengajukan dan mendapat pembiayaan pada periode berikutnya dengan plafond dua kali lipat dari pembiayaan sebelumnya. PMD mewajibkan seluruh nasabah memiliki tabungan selama masa pembiayaan. Tabungan tersebut memiliki akad *wadiah* dan merupakan bentuk komitmen serta edukasi budaya menabung bagi Nasabah PMD, tanpa ada saldo minimum, dan dapat digunakan selama menjadi Nasabah BTPN Sayriah. Setiap Nasabah PMD juga dilindungi dengan manfaat Asuransi jiwa untuk menjamin kepentingan nasabah dan bank serta santunan terhadap suami jika meninggal dunia (www.btpnsyariah, BTPN Syariah, 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah yang mendapatkan pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) mengatakan program pembiayaan PMD sangat membantu dengan plafond pembiayaan tidak terlalu tinggi dan sistem angsuran 2 minggu sekali membuat nasabah merasa diringankan dan sesuai kemampuan, rasa takut nasabah mengenai kemungkinan pembiayaan macet juga berkurang. Setiap mendapat tambahan plafond pembiayaan dari Bank nasabah sangat senang karena memungkinkan untuk tambahan modal sehingga usaha semakin berkembang (Suswanti, 2018).

Untuk menjadi nasabah pembiayaan Paket Masa Depan BTPN Syariah, calon nasabah harus melengkapi syarat-syarat sebagai berikut (Tiara, 2018) :

- a) Perorangan, Warga Negara Indonesia (WNI), dan berkedudukan di Indonesia;
- b) Wanita dari keluarga pra sejahtera dan cukup sejahtera yang sudah memiliki usaha atau yang ingin memiliki usaha;

- c) Usia minimum 18 tahun bagi wanita yang sudah menikah/pernah menikah dan minimal 21 tahun bagi wanita yang belum menikah dengan usia maksimal 60 tahun;
- d) Wajib memiliki tanda identitas pengenalan (KTP, SIM, Paspor)
- e) Bagi nasabah yang tidak memiliki tempat tinggal tetap (mengontrak) namun berada di area operasional MMS, maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syaratnya yaitu (1) masa tinggal minimum Nasabah 3 (tiga) tahun pada pemilik kontrakan yang sama. (2) Tempat usaha Nasabah berada di kios/toko/warung/tempat usaha tetap (bukan pedagang keliling) selama minimum 3 tahun.
- f) Apabila diketahui nasabah bertempat tinggal di atas tanah milik pihak ketiga, maka wajib dilakukan verifikasi atas kepemilikan lahan/tanah.
- g) Jika dalam 1 rumah terdapat beberapa keluarga atau beberapa calon nasabah, maka yang diperkenankan menjadi nasabah hanya 1 orang diantaranya.
- h) Nasabah memiliki kapasitas bayar yang memadai sesuai dengan standar *IIR (Installment to Income Ratio)* yang berlaku.

#### b. Akad Program Pembiayaan PMD

Pembiayaan PMD ini ditawarkan dalam bentuk pembiayaan *Murabahah* dengan akad *wakalah wal murabahah*. Dalam pengaplikasiannya BTPN Syariah MMS Eromoko tidak memenuhi kewajiban sebagai pihak yang memiliki barang terlebih dahulu, tetapi dengan melimpahkan kekuasaan pembelian barang ke nasabah. Dengan pertimbangan bahwa nasabah lebih memahami kebutuhannya, BTPN Syariah menguasakan kepada nasabah sebagai pihak ketiga untuk membeli dan memesan barang dengan syarat bukti pembelian jelas (Tiara, 2018).

#### c. Tujuan Program Pembiayaan PMD

Pembiayaan PMD ini ditujukan sebagai usaha pemberdayaan perempuan dari keluarga miskin di pedesaan, melalui pemberian pembiayaan untuk usaha produktif, sehingga pada pemberian pembiayaan PMD nantinya dapat mendorong seluruh nasabah untuk giat dalam mengelola dana yang

diberikan pada usahanya agar mendapatkan keuntungan yang diharapkan. BTPN Syariah berharap dapat memberikan solusi keuangan kepada setiap nasabah, membantu merancang perencanaan keuangan sederhana usaha nasabah, berpartisipasi dalam kelompok pembiayaan serta melibatkan karyawan BTPN Syariah untuk bertindak sebagai fasilitator dan menjadi teladan bagi nasabah BTPN Syariah dalam memulai mengembangkan usahanya. Selain memberikan akses dan kebutuhan modal usaha (keuangan inklusif), pembiayaan PMD diharapkan dapat memberikan pemberdayaan bagi jutaan nasabahnya (www.btpnsyariah, BTPN Syariah, 2018).

Dalam program pembiayaan PMD oleh BTPN Syariah MMS Eromoko penduduk yang dijadikan target pembiayaan yaitu perempuan yang berdomisili di Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Bank (Tiara, 2018).

d. Ketentuan pengukuran kemiskinan oleh BTPN Syariah

Dalam menentukan standar kemiskinan calon nasabah BTPN Syariah menggunakan *Progress Out Of Poverty Index (PPI)*. *Progress Out Of Poverty Index (PPI)* adalah indeks/ukuran yang digunakan secara internasional untuk menilai tingkat kemiskinan/prasejahtera ( taraf hidup) atau kemungkinan seseorang hidup dibawah garis prasejahtera berdasarkan indikator non keuangan yang ditetapkan sesuai hasil *survey* sosial ekonomi suatu negara.

e. Faktor Pendukung dan Penghambat Promosi Produk Pembiayaan PMD

Kegiatan promosi program PMD kemasyarakat sangat diperlukan karena target pasar program PMD merupakan wanita di pedesaan. Dalam kegiatan promosi dijumpai banyak sekali kesulitan diantaranya yaitu karena mayoritas masyarakat pedesaan takut untuk memiliki pinjaman dengan bank, masyarakat desa menganggap bahwa Bank Syariah sama dengan BMT, mayoritas masyarakat pedesaan bekerja sebagai petani mereka lebih memilih melakukan kredit dengan koperasi (Plecit) sehingga diperlukan banyak usaha dalam meyakinkan masyarakat akan produk dari Bank Syariah berbeda

dengan produk dari koperasi. Tetapi dalam kegiatan promosi BTPN Syariah mendapat dukungan dari aparat pemerintah kecamatan/kelurahan. Pihak pemerintah sangat mendukung program PMD karena dianggap membantu dalam mengentaskan kemiskinan dan pemerintah membantu BTPN dalam memperkenalkan daerah-daerah yang dianggap sangat membutuhkan produk pembiayaan PMD (Tiara, 2018).

f. Kelebihan dan Kelemahan Program Pembiayaan PMD

Setiap program ataupun produk dari Bank pasti memiliki kelemahan dan kelebihan, begitu pula program pembiayaan PMD. Dengan strategi tidak menggunakan jaminan harta sebagai syarat pembiayaan memberikan celah untuk nasabah meremehkan tanggungjawab mereka terhadap Bank, nasabah lebih leluasa melakukan kesalahan karena tidak adanya jaminan harta nasabah yang disimpan Bank. Sebagai contoh, apabila ada salah satu nasabah yang tidak membayar mempengaruhi nasabah lain sehingga ikut tidak membayar tanpa memikirkan BI *Checking*, sehingga hal tersebut dianggap sebagai kelemahan dari program PMD. Tidak hanya dianggap sebagai kelemahan, tidak menggunakan jaminan harta sebagai syarat pembiayaan juga dianggap sebagai kelebihan dari program pembiayaan PMD karena calon nasabah baru dengan latar belakang dari keluarga miskin dimudahkan untuk mendapatkan modal usaha. Kelebihan selanjutnya petugas BTPN turun langsung kelapangan untuk semua proses pembiayaan tanpa mengharuskan nasabah datang ke bank (Tiara, 2018).

Berikut penyusun akan menjelaskan kesimpulan dari beberapa hasil wawancara terkait evaluasi terhadap *context* dengan manajer, karyawan, dan nasabah pada BTPN Syariah MMS Eromoko dalam bentuk tabel, sebagai berikut :

**Tabel 4.3 Hasil Evaluasi terhadap *Context***

No	Aspek Evaluasi	Hasil
1	Gambaran Umum	Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) adalah salah satu produk penyaluran dana bagi usaha mikro kecil menengah dari PT. Bank Tabungan

		Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah, produk pembiayaan ini diberikan kepada sekelompok wanita baik yang belum menikah maupun yang sudah/pernah menikah dari keluarga miskin di pedesaan yang memiliki usaha untuk dikembangkan maupun bagi yang belum memiliki usaha tetapi mempunyai tekad untuk berusaha membangun dan menumbuhkan usaha yang tidak memiliki akses dan jaminan kepada bank. Dengan fasilitas pembiayaan senilai Rp 1-50 juta.
2	Akad	<i>Wakalah Wal Murabahah</i>
3	Tujuan	Usaha pemberdayaan perempuan baik yang belum menikah, sudah menikah, dan pernah menikah dari keluarga prasejahtera dan cukup sejahtera di pedesaan, melalui pemberian pembiayaan untuk usaha produktif.  Sasaran dari program pembiayaan PMD BTPN Syariah MMS Eromoko yaitu perempuan yang berdomisili di kecamatan Eromoko yang sesuai dengan kriteria calon nasabah yang ditetapkan.
4	Ketentuan pengukuran kemiskinan	Dalam menentukan standar kemiskinan calon nasabah BTPN Syariah menggunakan <i>Progress Out Of Poverty Index (PPI)</i> .
5	Pendukung dan Penghambat Promosi	Pendukung : Mendapat dukungan dari aparat pemerintah kecamatan/kelurahan  Penghambat :.mayoritas masyarakat pedesaan takut untuk memiliki pinjaman dengan bank, mayoritas masyarakat pedesaan bekerja sebagai petani mereka lebih memilih melakukan kredit dengan koperasi (Plecit) .

6	Kelebihan dan Kelemahan Program	<p>Kelemahan : strategi tidak menggunakan jaminan harta sebagai syarat pembiayaan memberikan celah untuk nasabah meremehkan tanggungjawab mereka terhadap Bank.</p> <p>Kelebihan : tidak menggunakan jaminan, petugas BTPN turun langsung kelapangan untuk semua proses pembiayaan tanpa mengharuskan nasabah datang ke bank.</p>
---	---------------------------------	---

*Sumber : Data diolah (2018)*

## 2. Evaluasi terhadap *Input*

Kegiatan evaluasi terhadap input bertujuan untuk membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber, alternatif apa yang akan diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan, dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya (Arifin, 2009). Adapun hasil evaluasi terhadap input program pembiayaan PMD di BTPN Syariah MMS Eromoko yaitu :

### a. SDM Program PMD

Nasabah dari Program Pembiayaan BTPN Syariah MMS Eromoko yaitu ibu-ibu dari keluarga miskin di kecamatan Eromoko, Wonogiri, Jawa Tengah yang pada saat ini berjumlah 525 nasabah, berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda baik dari latar belakang pendidikan dan pekerjaan. Karyawan yang bertugas di BTPN Syariah MMS Eromoko berjumlah 4 orang, terdiri dari 1 *Manajer/Senior community officer* dan 3 *community officer*. Semua karyawan di BTPN Syariah MMS Eromoko memiliki tanggung jawab dan peran penting dalam program pembiayaan PMD.

BTPN Syariah menetapkan ketentuan bagi petugas program pemberdayaan PMD harus ramah, sopan, bisa beradaptasi dengan masyarakat karena petugas dituntut untuk beradaptasi dengan nasabah yang tidak hanya hubungan antara petugas dengan nasabah melainkan hubungan

keluarga yang saling mendukung. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap nasabah BTPN Syariah melaulakan kegiatan pelatihan kepada karyawannya. Pelatihan pertama adalah *Training* untuk karyawan baru mengenai program PMD secara keseluruhan, strategi pemasaran, metode pendekatan dengan nasabah dan dilakukan selama 4 hari. Pelatihan kedua merupakan *training* setelah kenaikan pangkat dimana diajarkan mengenai penanganan terhadap nasabah baik lancar/ macet, cara penanganan kepada petugas. Selanjutnya pelatihan-pelatihan seperti peningkatan sistem teknologi dll.

Dalam program pembiayaan PMD karyawan BTPN Syariah diberikan fasilitas pendukung. Adapun fasilitas untuk karyawan diantaranya yaitu kendaraan, uang bensin, wisma (tempat tinggal), sembako (kebutuhan pokok), fasilitas *cleaner* (masak, cuci, setrika, bersih-bersih) (Tiara, 2018).

b. SOP Program Pembiayaan Paket Masa Depan.

Dalam pelaksanaan program pembiayaan PMD BTPN Syariah membuat SOP yang jelas, sehingga semua kegiatan pelaksanaan pembiayaan PMD dilakukan sesuai ketentuan SOP yang berlaku. SOP yang dibuat sangat mendukung dan tidak menyulitkan pelaksanaan program. Walaupun untuk setiap petugas memiliki strategi pemasaran masing-masing tetapi untuk kegiatan dilapangan tetap sesuai SOP, walaupun dalam pelaksanaan ada yang tidak sesuai SOP dikarenakan kebutuhan tetapi pada saat pembiayaan sudah berjalan akan tetap berpedoman dengan SOP. Menurut Manajer BTPN Syariah MMS Eromoko penerapan SOP dilapangan yaitu sekitar 85% (Tiara, 2018).

c. Pendampingan dari pihak bank kepada nasabah

Dalam memastikan kelancaran dan terkontrolnya pembiayaan Paket Masa Depan BTPN Syariah memberikan pendampingan kepada nasabah pembiayaan Paket Masa Depan. Pendampingan dimulai dari pencairan pembiayaan, pembelanjaan dana pembiayaan apakah modal digunakan sesuai akad, untuk periode awal pembiayaan petugas berkunjung dua sekali ke nasabah untuk pengecekan (PRS). PRS/Pertemuan Rutin Sentra dimulai



dua minggu setelah pencairan. Satu minggu setelah pencairan dilakukan PRS untuk monitoring nasabah dalam memanfaatkan dana pembiayaannya dan PRS seterusnya dilakukan setiap dua minggu .

Selanjutnya apabila ada nasabah yang membutuhkan bantuan petugas akan membantu misal nasabah butuh bantuan pemasaran produk maka petugas akan membantu memasarkan produk sampai nasabah mampu memasarkan produknya secara mandiri. Pendampingan juga sangat diperlukan untuk nasabah karena mayoritas nasabah merupakan masyarakat kampung sehingga sangat pesimis untuk memulai usaha dan keberhasilan usahanya sehingga peran petugas dalam pendampingan ini sangat dibutuhkan (Tiara, 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa nasabah pembiayaan PMD mengatakan bahwa petugas yang mendampingi nasabah sangat membantu. Menurut pengakuan salah satu nasabah mengatakan bahwa beliau dibantu dalam memasarkan produk olahan usahanya yaitu olahan keripik pisang dimulai dari 20 keripik pisang hingga mampu menjual 100 keripik pisang perhari, sampai sekarang nasabah bisa menjual produknya sendiri tanpa dibantu oleh petugas. Bisa dilihat bahwa dalam melakukan pendampingan petugas tidak hanya bersifat mengawasi tetapi juga ikut serta dalam keberhasilan usaha nasabah (Sutarsi, 2018).

d. Strategi alternatif untuk mengantisipasi kelemahan program PMD

Tidak menggunakan jaminan sebagai syarat mengajukan pembiayaan menjadi kelebihan sekaligus kelemahan dari program pembiayaan PMD. Untuk mengatasi kelemahan tersebut BTPN Syariah mengadakan Uang Kelompok (uang solidaritas/ *uang kwer-kwer* dan uang kas) . kewajiban mengumpulkan uang kelompok bertujuan untuk menunjukkan keseriusan dan tingkat kepercayaan anggota terhadap produk PMD. Dalam hal ini, uang kelompok merupakan uang nasabah dan bukan merupakan uang bank.

1) Uang solidaritas/ *uang kewer-kewer*

Dalam setiap PRS, nasabah wajib menyiapkan uang solidaritas. Besarnya uang solidaritas ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar nasabah dalam satu sentra dengan nilai minimum sejumlah angka angsuran terbesar dibagi jumlah anggota dalam sentra. Penggunaan uang solidaritas untuk pembayaran angsuran anggota yang tidak dapat membayar angsuran karena di BTPN Syariah tidak ada sistem menyita harta nasabah yang tidak bisa bayar.. Apabila dalam PRS semua nasabah melakukan pembayaran angsuran atas pembiayaan, maka uang solidaritas disarankan untuk dimasukkan dalam rekening tabungan milki nasabah.

2) Uang Kas

Besarnya uang kas ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara nasabah dalam satu sentra. Dalam keadaan medesak, termasuk dalam hal uang solidaritas yang terkumpul tidak mencukupi, sesuai kesepakatan nasabah uang kas dapat dipergunakan sebagai dana talangan untuk pembayaran angsuran. Uang kas dikumpulkan pada saat PDK(Tiara, 2018)

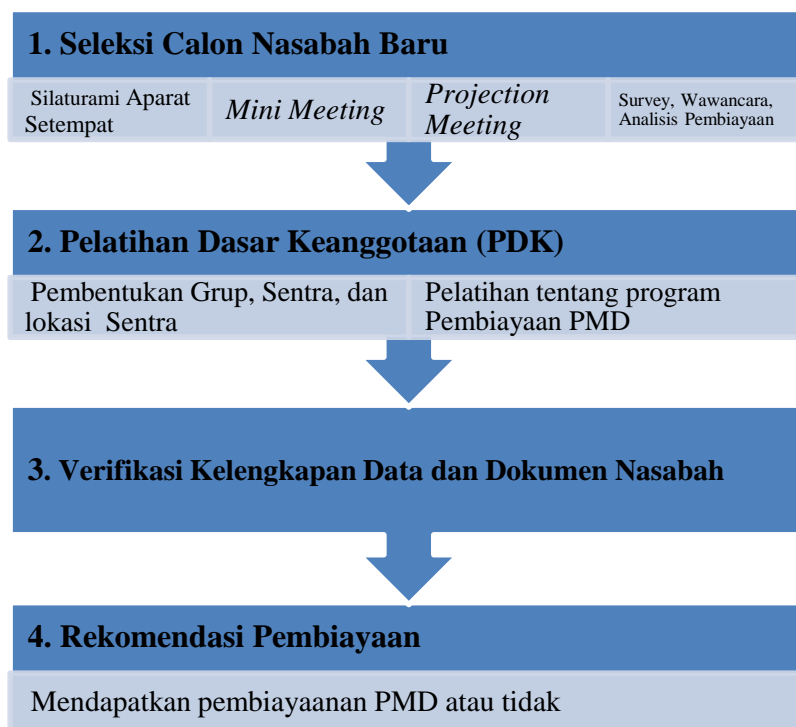
e. Strategi alternatif untuk mengatasi kegagalan program pembiayaan PMD.

Kegagalan yang sering timbul dalam pembiayaan PMD yaitu nasabah macet dan tidak mampu menyelesaikan pembiayaan. Untuk mengatasi masalah tersebut petugas MMS yaitu mencari nasabah baru dengan pencairan yang baru dengan syarat nasabah mau berkomitmen dalam pembiayaan. Dengan pencairan baru yang lebih besar maka kerugian yang ditimbulkan dari nasabah macet akan teratasi dan MMS aman dari kerugian. Dalam khusus pembiayaan tidak digunakan sesuai akad atau tidak digunakan untuk usaha maka nasabah harus melakukan pelunasan. Untuk pembiayaan bermasalah nasabah macet Bank akan melakukan upaya maksimal untuk mengembalikan status pembiayaan menjadi lancar dengan penagihan, *restrukturisasi*, dan hapus buku (Tiara, 2018).

Berdasarkan wawancara dengan salah satu nasabah macet pembiayaan PMD mengatakan bahwa Bank masih memberikan kesempatan untuk meneruskan pembiayaan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank dan nasabah mau berkomitmen untuk membangun kembali usaha yang dibangun dengan bantuan oleh BTPN Syariah (Parmi, 2018).

f. Prosedur Pemberian Pembiayaan PMD

Untuk lebih memperjelas proses pemberian pembiayaan di BTPN Syariah MMS Eromoko, peneliti menyajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut :



**Gambar 4.7 Prosedur Pembiayaan PMD**

*Sumber : (Tiara, 2018)*

Tahapan awal pembiayaan PMD yaitu seleksi calon nasabah baru dimulai dengan silaturahmi ke aparat pemerintahan setempat diantaranya kecamatan, polisi, dan kantor kelurahan guna menggali data masyarakat prasejahtera. Selanjutnya *Mini Meeting* (MM) yaitu pertemuan dengan perempuan yang menjadi target pasar untuk mengukur potensi kebutuhannya. Selanjutnya *Projection Meeting* (PM) yaitu pertemuan formal melalui arisan/pengajian guna memperkenalkan pembiayaan PMD kepada ibu-ibu

selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan suvey, wawancara, dan analisa pembiayaan untuk menggali karakter ibu-ibu calon nasabah . Tahapan selanjutnya yaitu Pelatihan Dasar Keanggotaan (PDK) merupakan sarana untuk memberikan informasi secara rinci mengenai pembiayaan Paket Masa Depan dan diberikan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan secara sederhana dilakukan selama 5 hari dan bagi nasabah yang lulus PDK akan dipertimbangkan mendapatkan pembiayaan. Selanjutnya kelompok/grup, sentra, dan lokasi sentra. Setelah semua dokumen dan administrasi lengkap nasabah menunggu keputusan dari pihak Bank apakah nasabah layak, dan/atau memenuhi syarat untuk mendapatkan pembiayaan PMD hingga proses pencairan dana pembiayaan (Tiara, 2018).

Berikut penyusun akan menjelaskan kesimpulan dari beberapa hasil wawancara terkait evaluasi terhadap *Input* dengan menager, karyawan, dan nasabah pada BTPN Syariah MMS Eromoko dalam bentuk tabel, sebagai berikut :

**Tabel 4.4 Hasil Evaluasi terhadap input**

No	Aspek Evaluasi	Hasil
1	SDM BTPN Syariah MMS Eromoko	Nasabah program PMD berjumlah 525 ibu-ibu yang berdomisili di Kecamatan Eromoko. Karyawan yang bertugas di BTPN Syariah MMS Eromoko berjumlah 4 orang, terdiri dari 1 <i>Manajer/Senior community officer</i> dan 3 <i>community officer</i> .
2	SOP Program PMD	SOP program sudah ada. Pelaksanaan prosedur dilapangan sudah dilakukan sesuai SOP dengan presentase kesesuaian sebesar 85 %.
3	Strategi alternatif untuk mengatasi kegagalan program	Petugas MMS mencari nasabah baru dengan pencairan yang baru dengan syarat nasabah mau berkomitmen dalam pembiayaan, dalam khusus pembiayaan tidak digunakan sesuai akad atau tidak digunakan untuk usaha maka nasabah

		harus melakukan pelunasan dan untuk pembiayaan bermasalah nasabah macet Bank akan melakukan upaya maksimal untuk mengembalikan status pembiayaan menjadi lancar dengan penagihan, <i>restrukturisasi</i> , dan hapus buku.
4	Prosedur Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seleksi Calon Nasabah Baru Silaturahmi Aparat Setempat, <i>Mini Meeting Projection Meeting Survey</i>, Wawancara, Analisis Pembiayaan</li> <li>2. Pelatihan Dasar Keanggotaan (PDK) Pembentukan Grup, Sentra, dan lokasi Sentra Pelatihan tentang program Pembiayaan PMD</li> <li>3. Verifikasi Kelengkapan Data dan Dokumen Nasabah</li> <li>4. Rekomendasi Pembiayaan.</li> </ol>

Sumber : Data diolah (2018)

### 3. Evaluasi Terhadap Process

Evaluasi terhadap proses dalam model CIPP menunjuk pada “apa” (*what*) kegiatan yang dilakukan dalam program, “siapa” (*who*) orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab program, “kapan” (*when*) kegiatan akan selesai. Evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan didalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana dan apa yang harus diperbaiki (Arifin, 2009). Adapun hasil evaluasi terhadap produk pada program pembiayaan Paket Masa Depan BTPN Syariah MMS Eromoko yaitu :

- a. Strategi BTPN Syariah dalam memperkenalkan program pembiayaan PMD .

Dalam memperkenalkan pembiayaan PMD BTPN Syariah memulai dengan memperkenalkan produk PMD ke aparat pemerintahan kecamatan

untuk memperoleh data mengenai keluarga pra sejahtera dan keluarga cukup sejahtera, tingkat kepadatan penduduk, kompetisi lembaga keuangan sejenis di daerah tersebut. Selanjutnya petugas mengunjungi kantor polisi untuk meminta perlindungan apabila dalam berjalannya program PMD terjadi masalah yang tidak diinginkan. Kemudian ke kelurahan guna memperkenalkan program PMD sekaligus meminta izin, selanjutnya petugas mengikuti kegiatan perkumpulan ibu-ibu seperti arisan dan pengajian untuk kegiatan promosi langsung ke ibu-ibu dan langsung mendata ibu-ibu yang berminat menjadi calon nasabah untuk ditindak lanjuti.

Reaksi nasabah terhadap program pembiayaan PMD sangat baik. Karena kemudahan syarat yang ditentukan dan tidak memberatkan nasabah. Nasabah merasa sangat terbantu khususnya nasabah yang sebelumnya belum memiliki usaha. Terlebih dalam pembiayaan PMD didukung petugas tidak segan untuk membantu mensukseskan usaha nasabah misalnya petugas membantu memasarkan produk olahan dari nasabah sehingga terjalin hubungan yang baik antar nasabah dengan petugas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah pembiayaan PMD mengatakan jika tidak menggunakan jaminan dirasa sebagai alasan terbesar mereka untuk menggunakan jasa pembiayaan PMD karena sebagai calon nasabah yang berlatar belakang kurang mampu secara finansial merasa dipercaya oleh bank dan dimudahkan dalam akses pembiayaan untuk tambahan modal usaha dalam upaya meningkatkan taraf hidupnya. Dengan kesibukan mengelola usahanya nasabah merasa sangat terbantu dengan semua proses transaksi dilakukan dengan kunjungan langsung petugas ke lapangan tanpa harus nasabah datang ke kantor (Sukini, 2018).

b. Realisasi pelaksanaan program PMD dilapangan

Dalam pelaksanaan pembiayaan PMD, semua karyawan BTPN Syariah MMS Eromoko bertugas sesuai *jobdesk* masing-masing. Nasabah pembiayaan PMD sejumlah 525 orang di layani oleh 4 karyawan. 3 PS (Pembina Sentra) /community officer bertanggung jawab kepada semua

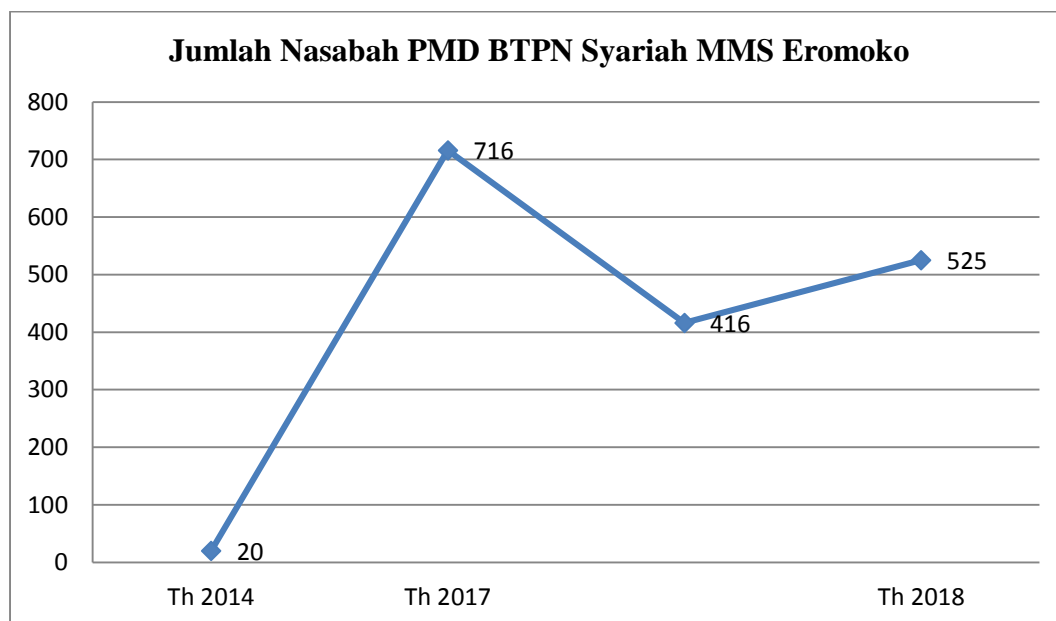
sentra yang dibinanya dan 1 Manager sentra (atasan PS) bertanggung jawab terhadap MMS,PS, dan semua nasabah pembiayaan PMD.

Dalam mekanisme pelaksanaannya akad pembiayaan yang digunakan BTPN Syariah yaitu *Wakalah Wal Murobahah*, dilakukan transaksi *Wakalah* dimana Bank menguasai kepada nasabah yang ditunjuk sebagai pihak ketiga untuk membeli dan memesan barang, setelah transaksi selesai bukti belanja diserahkan kepada Bank untuk selanjutnya Bank melakukan transaksi dengan nasabah menggunakan akad *Murabahah*. Penyerahan bukti nota belanja dilakukan maksimal 1 bulan setelah pencairan dana pembiayaan. Dalam khusus nasabah tidak dapat memberikan bukti nota belanja maka nasabah akan mendapat Surat Pernyataan Pembelian Barang /SPPB dari bank.

Namun dalam pelaksanaannya ditemui tidak sedikit nasabah yang melakukan penyelewengan terhadap dana pembiayaan yang tidak digunakan sesuai akad, terdapat khusus nasabah menggunakan dana pembiayaan untuk membayar hutang , kemudian didapati nasabah menggunakan atas nama orang lain dalam mengajukan pembiayaan. Hal ini tidak terlepas dari tidak efektifnya penggunaan SPPB yang memberikan celah bagi nasabah untuk memberikan bukti belanja yang tidak sesuai.(Tiara, 2018).

c. Perkembangan nasabah PMD BTPN Syariah MMS Eromoko

Jumlah nasabah pembiayaan PMD BTPN Syariah MMS Eromoko mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Berikut merupakan grafik pertumbuhan jumlah nasabah pembiayaan PMD BTPN Syariah MMS Eromoko :



**Gambar 4.8 jumlah nasabah pembiayaan PMD BTPN Syariah MMS Eromoko**

*Sumber: Data diolah (2018)*

Manajer BTPN Syraiah MMS Eromoko mengaku jumlah nasabah pembiayaan PMD di Kecamatan Eromoko sempat mencapai angka 716 nasabah, akan tetapi jumlah nasabah macet/bermasalah sangat besar, solusi yang diambil manajer yaitu dengan melakukan pelunasan terhadap nasabah bermasalah sejumlah 200 nasabah hingga jumlah nasabah tersisa 416. Solusi tersebut diambil karena walaupun jumlah nasabah tetinggi tetapi tingkat *liquiditas* Bank buruk maka Bank lebih memilih nasabah sedikit dengan pembiayaan lancar dengan konsekuensi petugas bekerja lebih keras untuk mendapatkan nasabah baru dengan pembiayaan baru (Tiara, 2018).

Namun BTPN Syariah MMS Eromoko tidak memiliki data *valid* mengenai jumlah nasabah sesuai status pernikahan dan jenis usaha, manajer hanya menjelaskan jumlah nasabah secara global.

d. Pembinaan terhadap nasabah program Paket Masa Depan

Bentuk pembinaan yang dilakukan dari Bank kepada nasabah yaitu Pelatihan Dasar Keanggotaan (PDK) . Pelatihan Dasar Keanggotaan (PDK) merupakan sarana untuk memberikan informasi secara rinci mengenai



pembiayaan Paket Masa Depan dan diberikan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan secara sederhana. Calon nasabah wajib lulus PDK karena merupakan salah satu syarat untuk mengajukan permohonan pembiayaan.

PDK dilakukan selama 5 hari berturut-turut dengan materi yang berbeda-beda bagi nasabah baru dan semua calon nasabah wajib ikut dengan kehadiran 100%, untuk melihat keseriusan calon nasabah terhadap program PMD dan membangun kebersamaan. Dilaksanakan selama 3 hari untuk nasabah lanjutan. Agenda yang dilakukan dalam PDK yaitu :

- a) Agenda hari pertama: Pembentukan grup dansentra, absensi, penjelasan mengenai tujuan pelatihan 5 hari, penjelasan tugas dan tanggung jawab ketua grup dan ketua sentra, penjelasan mengenai latar belakang dan target program PMD, pengumpulan uang kas hari pertama, doa bersama.
  - b) Agenda hari ke-dua : Doa bersama, absensi, pengumpulan uang kas hari kedua, *review* materi hari pertama, penjelasan peraturan program PMD, penjelasan mengenai program PMD, penjelasan mengenai Pertemuan Rutin Sentra (PRS).
  - c) Agenda hari ke-tiga : Doa bersama, absensi, pengumpulan uang kas hari ketiga, *review* materi hari pertama dan kedua, penjelasan mengenai tata cara pengajuan pembiayaan, penjelasan penggunaan pembiayaan, penjelasan mengenai uang solidaritas/uang kas dan uang tabungan.
  - d) Agenda hari ke-empat : Doa bersama, absensi, pengumpulan uang kas hari keempat, *review* materi hari pertama sampai ketiga, penjelasan Monitoring Usaha (MU), penjelasan denda dan sanksi keanggotaan, informasi pelantikan.
  - e) Agenda hari ke-lima : Doa bersama, absensi, pengumpulan uang kas hari kelima, persiapan pelantikan, *review* materi dari hari pertama hingga hari keempat, pelantikan anggota PMD, pengajuan permohonan pembiayaan.
- e. Cara menentukan kriteria nasabah yang sesuai setelah sampai dilapangan

Dalam menentukan kriteria nasabah tersebut pantas atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan, hal yang perlu dilakukan oleh petugas yaitu:

- a) Dilakukan pengecekan usaha nasabah untuk nasabah yang sudah memiliki usaha, untuk memastikan usaha yang dijalankan nasabah sesuai dengan syariat Islam dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- b) Pengecekan kondisi ekonomi nasabah. Dilakukan observasi kondisi tempat tinggal, aset milik nasabah, penghasilan dalam sebulan, jumlah keluarga, dan hutang nasabah dengan lembaga keuangan lain.
- c) Referensi tetangga dan aparat setempat untuk mengetahui *track record* nasabah tanpa diketahui oleh pihak lain khususnya nasabah PMD sendiri.

Dalam proses ini manajer BTPN Syariah MMS Eromoko mengaku jika petugas Pembina Sentra kurang bekerja secara maksimal sehingga hasil referensi yang didapat tidak 100% benar dan memberikan peluang untuk nasabah melakukan penyelewengan dana pembiayaan (Tiara, 2018).

f. Pola pembiayaan PMD

Untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami ketentuan pola pembiayaan di BTPN Syariah, penyusun menyajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.5 Pola Pembiayaan PMD**

No	Nama Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan	Jangka waktu
1	Paket Masa Depan (PMD) Awal	Min Rp 1.500.000,- s/d max Rp 2.000.000,- (bagi nasabah yang belum memiliki usaha) dan Rp 5.000.000,- (bagi nasabah yang sudah memiliki usaha)	1 tahun ( 12 bulan)
2	Paket Masa Depan (PMD) Siklus Lanjutan	Rp 10.000.000,- (disesuaikan dengan karakter dan kemampuan bayar nasabah)	1 tahun (12 bulan) dan 1,5 tahun (18 bulan)

3	Paket Masa Depan (PMD) Peningkatan Modal Kerja	Min Rp 11.000.000,- s/d max Rp 13.000.000,- (pertama kali pengajuan) dan Rp 50.000.000,- (bagi nasabah lanjutan)	1 tahun (12 bulan), 1,5 tahun (18 bulan), 2 tahun (24 bulan)
4	a. Paket Masa Depan (PMD) Tambahan -Modal Kerja Tambahan	Min Rp 500.000,- s/d max Rp 1.500.000,-	Selama pembiayaan utama berjalan
	b. Paket Masa Depan (PMD) Tambahan -Perbaikan Tempat Usaha	100% dari total biaya pembelian barang/material perbaikan dengan maksimal plafond Rp 10.000.000,-	Selama pembiayaan utama berjalan
	c. Paket Masa Depan (PMD) Tambahan -Pemilikan Handphone Produktif	Sesuai harga handphone yang di berikan	Selama pembiayaan utama berjalan

Sumber : (Tiara, 2018)

Fasilitas diatas diberikan sebagai modal usaha tanpa jaminan yang pengembaliannya dilakukan dengan cara mencicil secara 2 minggu-an berdasarkan jangka waktu yang sudah ditentukan dan dilakukan di lokasi sentra saat Pertemuan Rutin Sentra (PRS). Selain melakukan angsuran nasabah disarankan untuk menabung, uang tabungan untuk pertama kali, nasabah harus menyetor sebesar 10% dari jumlah pembiayaan.

g. Jenis usaha nasabah pembiayaan PMD di Kecamatan Eromoko

Di Kecamatan Eromoko jenis usaha yang dijalankan nasabah pembiayaan PMD terdiri dari berbagai bidang usaha, yaitu:

a) Perdagangan

Dalam usaha perdagangan nasabah Kecamatan Eromoko terdiri dari berbagai macam usaha ,diantaranya yaitu : pedagangkelontong,pedagang sayur keliling, pedagang jamu

keliling, pedagang jajan pasar, *catering*, pedagang pakaian, elektronik, jual emas, produksi olahan (keripik tempe, keripik pisang,dll)

b) Peternakan

Dalam bidang peternakan perdagangan nasabah Kecamatan Eromoko terdiri dari berbagai macam usaha ,diantaranya yaitu : ternak lele, ayam, kambing, dan sapi.

c) Pertanian

Mayoritas nasabah pembiayaan PMD Kecamatan Eromoko memiliki usaha pertanian .jenis pertanian yang ditekuni oleh nasabah yaitu tanaman musiman, nasabah menanam jenis tanaman sesuai musim seperti padi, kacang-kacangan, kedelai, jagung, dan singkong.

Jenis bidang usaha tersebut merupakan jenis usaha yang diperbolehkan oleh Bank karena tidak termasuk jenis usaha yang di larang dalam syariat Islam. Untuk memastikan penerapan prinsip syariah/pemenuhan prasyarat pembiayaan hanya diberikan pada jenis usaha yang sesuai prinsip syariah serta larangan pemberian pembiayaan bagi jenis usaha yang bertentangan dengan peraturan perundangan/hukum yang berlaku, maka BTPN Syariah menetapkan jenis usaha yang termasuk dalam *Negative Risk* pembiayaan. Jenis usaha yang dilarang untuk dibiayai yaitu :

- a) Rentenir/membungakan uang.
- b) Usaha perjudian dalam bentuk apapun.
- c) Usaha perdagangan/jual beli barang dengan sistem ijon/*gharar*.
- d) Usaha perdagangan minuman keras/minuman yang memabukkan.
- e) Usaha perdagangan daging babi,termasuk ternak babi.
- f) Usaha perdagangan daging anjing.
- g) Usaha perdagangan kodok untuk dikonsumsi, termasuk beternak kodok untuk dikonsumsi (dijual kerestoran).
- h) Usaha perdagangan ular, buaya, biawak untuk dikonsumsi.

- i) Usaha yang berhubungan dengan kegiatan prostitusi dan hiburan untuk orang dewasa.
- j) Usaha atau jual beli segala produk yang dianggap ilegal sesuai ketentuan pemerintah/perundang-undangan.
- k) Usaha berjualan rokok (nasabah sepenuhnya menjual rokok dan tidak menjual barang lainnya pada toko/tempat usaha).

#### h. Peluang dan hambatan program PMD

Dalam setiap program terdapat peluang dan hambatan yang dapat mendukung dan menghambat suksesnya suatu program tidak terkecuali program pembiayaan PMD. Peluang dari pembiayaan PMD diantaranya yaitu:

- a) Mendapat dukungan dari aparat pemerintahan.
  - b) Usaha mikro sedang berkembang pesat di daerah pedesaan
- Sedangkan, hambatan dari pembiayaan PMD yaitu :
- a) Pola pikir masyarakat pedesaan tentang Bank yang dianggap menakutkan.
  - b) Persaingan dengan lembaga keuangan yang sejenis
  - c) Persaingan dengan program pembiayaan yang sejenis di Kecamatan Eromoko.

Berikut penyusun akan menjelaskan kesimpulan dari beberapa hasil wawancara terkait evaluasi terhadap *Process* dengan manajer, karyawan, dan nasabah pada BTPN Syariah MMS Eromoko dalam bentuk tabel, sebagai berikut :

**Tabel 4.6 Hasil Evaluasi terhadap Proses**

No	Evaluasi <i>Process</i>	Hasil
1	Strategi promosi	BTPN Syariah melakukan pendekatan dengan aparat pemerintahan dalam kegiatan promosi guna mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan program.
2	Realisasi Pelaksanaan Pembiayaan	PMD menggunakan ada <i>Wakalah wal Murabahah</i> , dengan pelaksanaan akad wakalah

		<p>terlebih dahulu untuk pembelian barang oleh nasabah dilanjutkan akad murabahah untuk penyerahan barang dari bank ke nasabah.</p> <p>Semua nasabah adalah tanggung jawab semua petugas. 1 Manajer sentra bertanggung jawab pada MMS,PS, dan nasabah. 3 Pembina Sentra bertanggungjawab pada sentra binaannya.</p> <p>Ditemukan banyak penyelewengan akad yang dilakukan nasabah seperti digunakan untuk membayar hutang dan tidak untuk modal usaha.</p>
3	Perkembangan Nasabah PMD	Perkembangan nasabah bersifat positif dari awal program terus meningkat hingga angka 716 dan dipangkas hingga 416 karena masalah penyelewengan akad dan nasabah macet, hingga saat ini nasabah berjumlah 525.
4	Pembinaan Terhadap Nasabah	Pelatihan dasar keanggotaan/PDK yang dilakukan selama 5 hari dengan materi yang berbeda mengenai program Pembiayaan PMD dan pengelolaan keuangan secara sederhana.
5	Cara menentukan kriteria nasabah yang sesuai setelah sampai dilapangan	Pengecekan usaha nasabah tidak melanggar prinsip Islam, pengecekan kondisi ekonomi nasabah, referensi tetangga dan aparat setempat. Namun kegiatan tersebut kurang dilakukan secara maksimal oleh petugas sehingga informasi yang didapat kurang akurat.
6	Pola Pembiayaan	(PMD)memberikan fasilitas pembiayaan senilai Rp 1- 50 juta yang dibayarkan melalui cicilan setiap 2 minggu dalam waktu satu tahun.Diakhir periode nasabah dengan <i>track record</i> bagus

		selama masa pembiayaan, dalam artian nasabah membayar angsuran tepat waktu dapat mengajukan dan mendapat pembiayaan pada periode berikutnya dengan plafond dua kali lipat dari pembiayaan sebelumnya. PMD mewajibkan seluruh nasabah memiliki tabungan selama masa pembiayaan.
7	Jenis Usaha Nasabah	Jenis usaha yang dijalankan nasabah terdiri dari usaha dibidang perdagangan, peternakan dan pertanian yang sesuai dengan jenis usaha yang diperbolehkan dalam prinsip Islam.
8	Peluang dan Hambatan Program	Peluang : mendapat dukungan dari aparat pemerintah, usaha mikro sedang berkembang Penghambat : persaingan dengan produk dan lembaga keuangan sejenis, pola pikir masyarakat desa tentang bank.

*Sumber : Data diolah (2018)*

#### **4. Evaluasi Terhadap *Product***

Evaluasi produk merupakan kegiatan mendaur ulang keputusan dalam suatu program. Pertanyaan yang harus dijawab yaitu adalah hasil yang telah dicapai dan apa yang harus dilakukan setelah program berjalan. Sehingga didapatkan keputusan apakah program akan terus berjalan, berakhir, atau ada keputusan yang lainnya (Jabar, 2004). Berikut merupakan hasil evaluasi terhadap Produk program pembiayaan PMD di BTPN Syariah MMS Eromoko :

a. Dampak program PMD bagi nasabah di kecamatan Eromoko

Seperti program lain pada umumnya, pelaksanaan program PMD juga memiliki tujuan yang dapat memberikan dampak yang baik bagi penggunanya (nasabah). Dampak yang terlihat bagi nasabah pembiayaan PMD di kecamatan Eromoko yaitu usaha yang dijalankan nasabah semakin berkembang, nasabah yang sebelumnya belum

memiliki usaha setelah mendapat pembiayaan dapat memiliki usaha mandiri, taraf hidup nasabah perlahan meningkat, menambah silaturahmi antar anggota baik nasabah dan petugas. Tidak bisa dipungkiri program PMD tidak dapat memberikan dampak positif 100% terhadap semua nasabahnya, masih ditemui nasabah yang mengalami gagal usaha.

Untuk melihat dampak program PMD bagi nasabah di kecamatan Eromokopenyusun melakukan wawancara eksternal (nasabah pembiayaan PMD Kecamatan Eromoko) kepada 15 orang nasabah. Hasilnya sebagai berikut :

**Tabel 4.7 Identitas masyarakat kecamatan Eromoko dan Dampak pembiayaan PMD bagi nasabah Kec Eromoko.**

No	Nama	Pendidikan	Alamat	Jenis Usaha	Lama Pembiayaan	Dampak yang ditimbulkan
1	Desi Saputri	SMK	Bakalan	Pedagang Pakaian	1 tahun	Pendapatan meningkat
2	Sukini	SD	Bakalan	Pedagang Snack di pasar	1,5 tahun	Pendapatan meningkat
3	Sularmi	SMP	Bakalan	Petani dan pedagang sayur dipasar	1,5 tahun	Pendapatan meningkat
4	Sutarmi	SMA	Sampang	Pedagang sembako dan pakaian	1,5 tahun	Pendapatan meningkat
5	Patmi Lestari	SMP	Sampang	Pedagang Jamu	1,5 tahun	Pendapatan mengikat
6	Juweti	SMP	Sampang	Petani	1,5 tahun	Pendapatan fluktuatif
7	Puji Lestari	SMA	Prambe	Petani	1,5 tahun	Pendapatan meningkat
8	Sri Susanti	SMP	Cemangkah	Peternak lele	1,5 tahun	Pendapatan menurun
9	Dwi Astuti	SMK	Cemangkah	Peternak lele	1,5 tahun	Pendapatan meningkat



10	Parmi	SMP	Cemangkah	Petani	1,5 tahun	Pendapatan meningkat
11	Yuli	SMA	Cemangkah	Petani	1,5 tahun	Pendapatan meningkat
12	Sri Sutarsi	SMP	Sengon	Pedagang Jamu	1 tahun	Pendapatan meningkat
13	Daryati	SMP	Cemangkah	Pedagang emas	1,5 tahun	Pendapatan meningkat
14	Setiyani	SD	Songputri	Petani	1 tahun	Pendapatan meningkat
15	Suswanti	SMP	Prambon	Petani	1 tahun	Pendapatan meningkat

*Sumber : Data diolah (2018)*

Berdasarkan wawancara dengan salah satu nasabah pembiayaan PMD yang sebelumnya belum memiliki mengatakan *“Saya sebelumnya cuma ibu rumah tangga mbak. Ya mengandalkan penghasilan. Setelah dapet modal dari BTPN saya pakai buat usaha ternak lele karena memang lagi musimnya pada ternak lele, ya Alhamdulillah usahanya bisa jalan. Jadi pendapatan ya tambah ,bisa buat bantu suami. Kalau pengen beli baju juga udah bisa beli sendiri tapi ya seizin suami.”*(Astuti D. , 2018).

Nasabah lain yang sudah memiliki usaha mengatakan *“Sebelumnya saya sudah usaha jual jajanan pasar di pasar Eromoko mbak. Uang dari BTPN Syariah saya pakai buat tambah modal usaha, jadi saya bisa terima jasa catering sekarang. Pendapatan Alhamdulillah naik mbak sedikit-sedikit”* ujar Ibu Sukini salah satu nasabah PMD (Sukini, 2018). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa program pembiayaan PMD berkontribusi dalam meningkatkan taraf hidup nasabahnya

Namun hasil berbeda ditunjukkan oleh ibu Sri Susanti karena usahanya gagal. Beliau mengatakan *“Uangnya saya pake buat ternak lele mbak, tapi mungkin karena perawatannya kurang bagus jadi gagal. Lelena banyak yang mati jadi saya berhenti usaha ternak lelanya”* ujar ibu Susanti (Susanti, 2018)

b. Evaluasi dari BTPN Syariah

Untuk mengevaluasi pelaksanaan program pembiayaan PMD dalam mengambil keputusan apakah tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dalam perberdayaan telah tercapai atau belum dan selama proses maupun hasil program dapat terkontrol, BTPN Syariah melakukan kegiatan pendampingan nasabah sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaan pembiayaan dan kondisi usaha Nasabah (*Maintenance* nasabah). Kegiatan *maintenance* nasabah ini diantaranya yaitu :

a) Pertemuan Rutin Sentra (PRS)

PRS dilakukan untuk pencairan/pelunasan pembiayaan, pembayaran angsuran, dan setor/tarik tabungan. PRS dilakukan setiap 2 minggu sekali di hari, jam, lokasi yang sama. Hari, jam, dan lokasi PRS ditentukan berdasarkan diskusi anggota dan PS pada saat *mini meeting* (MM).

b) Monitoring Usaha (MU)

Monitoring usaha dilakukan dengan tujuan untuk memeriksa penggunaan pembiayaan oleh nasabah apakah sesuai dengan tujuan utama. MU dilakukan selambat-lambatnya dua bulan setelah pencairan kepada semua anggota yang telah menerima pembiayaan. MU dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah guna memastikan kebenaran usaha nasabah. PS bisa bertanya ke tetangga/orang sekitar untuk memastikan kegiatan usaha nasabah. Jika dalam MU diperoleh informasi bahwa terdapat nasabah yang melakukan penyimpangan penggunaan pembiayaan tidak sesuai tujuan pembiayaan awal maka akan mendapat peringatan dan sanksi dari pihak bank. MU juga dilengkapi dengan bukti belanja modal nasabah dan foto usaha nasabah terbaru.

c) *Surprised Visit* (SV)

*Surprised visit* merupakan kegiatan monitoring pelaksanaan PMD yang dilakukan oleh Manajer Sentra secara mendadak/ tidak terjadwal. SV dilakukan dengan mengunjungi sentra pada saat Pertemuan Rutin Sentra (PRS) dan dengan mengunjungi rumah atau tempat usaha nasabah. SV dilakukan minimum 1 sentra dan dilakukan kunjungan

minimum 3 nasabah setiap bulan. Dalam tahap ini manajer dapat menjumpai penyelewengan pembiayaan oleh nasabah.

Dalam kegiatan evaluasi program PMD ini BTPN Syariah melibatkan semua petugas baik *Senior Community Officer* dan *Community Officer*.

c. Hasil capaian Program PMD

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh petugas BTPN Syariah capaian hasil dari program pembiayaan PMD ini sebesar 75 % yang sesuai dengan tujuan, visi, dan misi program. Program pembiayaan PMD ini didistribusikan sesuai tujuannya, yaitu untuk wanita miskin baik yang sudah maupun belum memiliki usaha. Hasil yang dimaksud yaitu dari hasil evaluasi didapat nasabah yang sebelumnya belum memiliki usaha/ibu rumah tangga bisa membangun usaha sendiri seperti jual jamu keliling, ternak lele, toko kelontong dan nasabah yang sebelumnya sudah memiliki usaha bisa mengembangkan usahanya dengan suntikan modal dari dana pembiayaan. Sisanya masih banyak khusus penyelewengan dana pembiayaan oleh nasabah yang tidak sesuai akad, seperti dana pembiayaan tidak digunakan untuk usaha melainkan untuk membayar hutang, selain itu didapati nasabah yang menggunakan atas nama orang lain untuk mengajukan pembiayaan.

Untuk mencocokkan kesesuaian antara hasil wawancara internal (Manajer BTPN Syariah MMS Eromoko) dengan pelaksanaan dilapangan, penyusun melakukan wawancara eksternal (nasabah pembiayaan PMD BTPN Syariah MMS Eromoko) dan observasi dilapangan. Hasilnya sebagai berikut :

**Tabel 4.8 Hasil Observasi**

No	Aspek	Kesesuaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
	<b>Fasilitas Karyawan</b>			
1	Kendaraan Petugas	V		
2	Wisma	V		
	<b>Dokumen</b>			
1	SOP Program PMD	V		Sekitar 85 %

2	Kartu angsuran	V		
3	Kartu tabungan	V		
4	Form absensi nasabah	V		
5	Brosur media iklan	V		
6	Laporan keuangan nasabah		V	Tidak ada laporan keuangan tetapi laporan nota belanja dan foto usaha terbaru
7	Usaha nasabah	V		
8	Rumah nasabah	V		
	<b>Pelaksanaan Program</b>			
1	Akad ( <i>wakalah wal murabahah</i> )	V		
2	PDK (Pelatihan Dasar Keanggotaan)	V		
3	Berkunjung ke aparat pemerintahan	V		
4	Kunjungan petugas	V		
5	Pendampingan nasabah	V		
6	Sikap ramah petugas	V		
7	Penyelesaian pembiayaan bermasalah	V		
	<b>Kesesuaian dengan realisasi di lapangan</b>		<b>Cukup Sesuai</b>	Cukup sesuai dengan hasil wawancara internal

*Sumber : Hasil observasi 2018*

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penyusun mengenai kesesuaian prosedur program PMD dengan realisasi pelaksanaan program dilapangan peneliti menyimpulkan sudah cukup sesuai. Melihat dari fasilitas yang diberikan kepada petugas dan dokumen-dokumen pendukung terlaksananya program pembiayaan PMD secara baik sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan BTPN Syariah. Kemudian melihat dari pelaksanaan program dilapangan sudah sesuai SOP sebesar 85% yang ditetapkan dengan

pelaksanaan akad yang sesuai, pelaksanaan prosedur pembiayaan yang sesuai, petugas kunjungan terhadap nasabah, pelayanan yang ramah dan sopan dari petugas demi kepuasan nasabah dan terjalinnya hubungan silaturahmi yang baik antara nasabah dan petugas, kemudian kegiatan PDK (Pelatihan Dasar Keanggotaan) yang bertujuan memperdayakan nasabah, dan terstruktur penyelesaian pembiayaan bermasalah sehingga tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan pembiayaan PMD.

Berikut penyusun akan menjelaskan kesimpulan dari beberapa hasil wawancara terkait evaluasi terhadap *Product* dengan menager, karyawan, dan nasabah pada BTPN Syariah MMS Eromoko dalam bentuk tabel, sebagai berikut :

**Tabel 4.9 Hasil Evaluasi terhadap *Product***

No	Evaluasi <i>Product</i>	Hasil
1	Dampak Program PMD bagi nasabah di Kecamatan Eromoko	<p>Nasabah melakukan pembiayaan dalam jangka waktu 1-1,5 tahun, dengan plafond berbeda-beda . Nasabah terdiri dari ibu-ibu yang memiliki suami dan janda dari keluarga miskin di kecamatan Eromoko.</p> <p>Dampaknya usaha yang dijalankan nasabah semakin berkembang, nasabah yang sebelumnya belum memilki usaha setelah mendapat pembiayaan dapat mumiliki usaha mandiri, taraf hidup nasabah perlahan meningkat , menambah silaturahmi antar anggota baik nasabah dan petugas.</p> <p>Tidak bisa dipungkiri program PMD tidak dapat memberikan dampak positif 100% terhadap semua nasabahnya, masih ditemui nasabah yang mengalami gagal usaha.</p>
2	Evaluasi Program PMD	Kegiatan yang dilakukakan yaiatu Pertemuan Rutin Sentra (PRS), Monitoring Usaha, dan

		<i>Surprised Visit (SV)</i> oleh manajer bank
3	Hasil Capaian Program	Realisasi pelaksanaan program dilapangan peneliti menyimpulkan sudah cukup sesuai. Penyaluran dana pembiayaan sudah sesuai dengan sasaran yaitu ibu-ibu yang memiliki suami dan janda dari keluarga miskin di kecamatan Eromoko.

*Sumber : Data diolah (2018)*

### **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) adalah salah satu produk penyaluran dana bagi usaha mikro kecil menengah. Pembiayaan PMD ini ditujukan sebagai usaha pemberdayaan melalui pemberian pembiayaan untuk usaha produktif, sehingga pada pemberian pembiayaan PMD nantinya dapat mendorong seluruh nasabah untuk giat dalam mengelola dana yang diberikan pada usahanya agar mendapatkan keuntungan yang diharapkan. (www.btpnsyariah, BTPN Syariah, 2018).

Dari hasil paparan data hasil penelitian dapat dijelaskan pembahasan mengenai evaluasi program pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) BTPN SyariahMMS Eromokodalam pemberdayaan ekonomi perempuan miskin dengan metode evaluasi CIPP di jumpai berbagai fakta-fakta dilapangan.

Produk pembiayaan PMD BTPN Syariah MMS Eromoko ini diberikan kepada sekelompok wanita miskin di Kecamatan Eromoko baik yang belum menikah maupun yang sudah/pernah menikah yang memiliki usaha untuk dikembangkan maupun bagi yang belum memiliki usaha tetapi mempunyai tekad untuk berusaha. Harapan Bank yaitu dapat memperdayakan perempuan sehingga mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan mampu membantu ekonomi keluarga. Dalam hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al-Quran bahwa perempuan dapat menerima bagian sesuai prestasinya. Dijelaskan bahwa perempuan memiliki potensi dan eksistensi yang sama dalam segala bidang termasuk bidang ekonomi. Dalam Al-Quran dijelaskan pada ayat berikut ini :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ

مِّمَّا كَتَبْنَ وَسْءُلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (karena) bagi kaum laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (QS An-Nisa/4 : 32).

Hasil evaluasi selanjutnya usaha yang dilakukan BTPN Syariah dalam memastikan pelaksanaan program pembiayaan PMD terkontrol sehingga tercapai tujuan yang ditetapkan, bank melakukan kegiatan *Maintenance* nasabah/pendampingan. Pihak Bank khususnya pembina sentra/PS bertanggung jawab dalam memberikan pendampingan kepada nasabahnya. Sesuai dengan tujuan pemberdayaan perempuan yang ingin dicapai. PS tidak hanya bertugas mengambil angsuran tetapi juga bertugas memberikan arahan cara pengelolaan uang, sehingga menambah wawasan nasabah dalam menjalankan usahanya. Dalam pelaksanaannya di BTPN Syariah MMS Eromoko PS kurang menjalankan tugasnya dalam pendampingan kepada nasabah. Jumlah karyawan yang bertugas sebanyak 4 karyawan dan 1 lainnya merangkap sebagai manajer bertanggung jawab terhadap 525 karyawan juga menjadi faktor kurangnya pendampingan yang diberikan karena tingginya beban tanggungjawab membuat petugas teledor dan kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut yang menyebabkan timbulnya berbagai masalah seperti usaha yang dijalankan nasabah macet dan terjadi penyelewengan dana pembiayaan dimana modal tidak digunakan sesuai akad.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu oleh Rianti Pertiwi (Pratiwi, 2014) yang berjudul Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mendorong Usaha Kaum Perempuan hasilnya dalam pemberian pembiayaan Bank harus LKMS harus dapat berperan sebagai pusat pembelajaran bagi nasabahnya.

Dengan memberikan pendampingan, baik dalam administrasi keuangan usaha, maupun mensosialisasikan pemahaman tentang ekonomi Islam, agar tujuan adanya pembiayaan mikro terhadap perempuan tidak menyimpang.

Membahas akad yang digunakan program Pembiayaan PMD dalam pelaksanaannya menggunakan akad *Wakalah Wal Murobahah*. Dalam pelaksanaan pembiayaan PMD dengan penerapan prinsip jual beli antara BTPN Syariah dengan nasabah, dimana Bank membeli kebutuhan nasabah kemudian dijual kepada nasabah sebesar harga beli ditambah dengan *margin* yang telah disepakati antara Bank dengan nasabah. Seperti teori *Murabahah* yang dikemukakan oleh Muhamad (Muhamad, 2014) *Murabahah* adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Berdasarkan akad jual beli Bank membeli barang yang dipesan oleh dan menjualnya kepada nasabah. Pada aplikasinya di lapangan BTPN Syariah tidak memenuhi syarat sebagai pihak yang memiliki barang terlebih dahulu namun Bank menguasai pemesanan dan pembelian barang kepada pihak ketiga yaitu nasabah dengan syarat bukti transaksi belanja diberikan kepada Bank, dalam hal ini BTPN Syariah menggunakan akad *Wakalah*. BTPN Syariah dalam mempraktikkan akad pembiayaan PMD sudah sesuai prinsip syariah karena pelaksanaan akad dilakukan secara terpisah dengan menyelesaikan akad *wakalah* dilanjutkan dengan akad *mudharabah*.

Sesuai Fatwa DSN-MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000 (DSN-MUI, 2000) yang menyebutkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad, pihak Bank dapat mengadakan perjanjian dengan nasabah. Jika Bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Hasil evaluasi yang ingin dicapai dari program pembiayaan PMD yaitu keberhasilan program dalam memperdayakan nasabahnya. Peran Program Pembiayaan PMD BTPN Syariah MMS Eromoko dalam memperdayakan ekonomi perempuan di Kecamatan Eromoko dengan meningkatkan perekonomian sudah berdampak positif. Terbukti dengan banyaknya penyebaran lowongan



pekerjaan bagi nasabah yang belum memiliki usaha sehingga dapat memiliki usaha mandiri. Namun tidak semua nasabah merasakan dampak positif dari program pembiayaan PMD. Sebagian responden mengatakan tidak merasakan dampak apapun. Seperti yang dialami oleh ibu Sri Susanti yang membuka usaha ternak lele dan mengalami gagal usaha dan tidak mendapatkan keuntungan.. Beliau mengaku membuka usaha tersebut karena sedang marak usaha ternak lele, sehingga Beliau membuka usaha tanpa memikirkan persaingan yang terjadi di pasar. Hasilnya usahanya tidak dapat bersaing dengan banyaknya pedagang sejenis dan mengalami kerugian usaha. Seharusnya sebelum mengizinkan usaha yang akan dijalankan oleh nasabah Bank mengetahui kendala yang akan dialami nasabah dan menyiapkan solusinya. Sebagaimana dalam konsep pemberdayaan tidak hanya memberikan modal tetapi juga membangun hubungan kerjasama dan kemitraan yang saling menguntungkan.

Hal ini sesuai dengan konsep pemberdayaan menurut Sumodinngat (Auliya, 2014) bahwa dalam pemberdayaan melibatkan dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memperdayakan. Begitupun BTPN Syariah sebagai pihak yang memperdayakan peran pendampingan lapangan kepada nasabah sebagai pihak yang diperdayakan tidak boleh kurang dan dijalankan secara maksimal.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan penelitian tentang evaluasi program pembiayaan Paket Masa Depan BTPN Syariah MMS Eromoko maka dapat diambil kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini adalah hasil evaluasi terhadap *context* program pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) BTPN Syariah MMS Eromoko sudah didistribusikan sesuai target pasarnya yaitu perempuan dari keluarga miskin baik yang belum memiliki usaha dan sudah memiliki usaha di Kecamatan Eromoko.

Kemudian hasil evaluasi terhadap *input* yaitu jumlah nasabah program PMD BTPN Syariah MMS Eromoko saat ini berjumlah 525 nasabah dan dikelola oleh 3 Pembina Senta dan 1 Manajer, jumlah tersebut dianggap kurang karena dengan tingginya beban kerja yang ditanggung maka kinerja petugas kurang maksimal .

Dari evaluasi terhadap *process* dapat disimpulkan pelaksanaan akad pembiayaan dengan menggunakan akad *Wakalah wal Murabahah* tidak menyalahi prinsip syariah dimana pelaksanaan akad dilakukan secara terpisah. Manajemen BTPN Syariah MMS Eromoko tidak memiliki data valid tentang jumlah modal yang dikeluarkan setiap bulannya dikarenakan jumlah pembiayaan yang tidak tetap dan tidak ada data valid mengenai klasifikasi jumlah nasabah sesuai status kawin dan jenis usahanya.

Hasil evaluasi terhadap *product* menunjukkan pelaksanaan program pembiayaan PMD kegiatan *Maintenance* nasabah/pendampingan kurang dijalankan secara maksimal sehingga tujuan program dalam pemberdayaan tidak tercapai sepenuhnya dan banyak terjadi khusus penyelewengan dana pembiayaan. Sehingga capaian tujuan program pembiayaan PMD tidak berdampak secara menyeluruh ke semua wanita miskin yang menjadi nasabah. Sebagian nasabah mengalami gagal usaha karena kurangnya pelatihan yang diberikan oleh Bank

sehingga tujuan pemberdayaan yang diinginkan tidak rasakan oleh seluruh nasabah.

## B. Saran

### 1. Untuk Manajemen BTPN Syariah MMS Eromoko

- a. Dalam melakukan kegiatan Maintenance nasabah, manajemen BTPN Syariah MMS Eromoko perlu ditingkatkan lagi. Peran pembina sentra perlu dimaksimalkan lagi supaya tujuan pemberdayaan yang diharapkan tercapai.
- b. Untuk pencairan pembiayaan terhadap nasabah baru diharapkan petugas melakukan evaluasi yang lebih detail sehingga dapat mengurangi penyelewengan akad dana pembiayaan oleh nasabah.
- c. Perlu ditambah jumlah petugas/Pembina Sentra, sehingga untuk menangani jumlah nasabah yang banyak petugas dapat bekerja secara maksimal dan mengurangi dampak negatif dari program pembiayaan.
- d. Perlu diperbaiki mengenai syarat pembiayaan tanpa jaminan sehingga tidak menjadi ancaman/kelemahan bagi pembiayaan PMD.

### 2. Penelitian selanjutnya

Ditujukan untuk peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dijadikan sebagai referensi dalam penelitian berikutnya dengan sudut pandang yang berbeda. Penelitian yang dilakukan penulis ini masih terdapat banyak kekurangan dari kelengkapan aspek evaluasi. Mungkin dimasa yang akan datang perlu dilakukan penelitian secara mendalam guna mendapatkan metode-metode baru yang dapat dilakukan dalam melaksanakan kegiatan evaluasi.

### 3. Untuk Masyarakat

Ditujukan untuk masyarakat/nasabah BTPN Syariah khususnya nasabah program pembiayaan PMD, diharapkan lebih memanfaatkan secara maksimal dana pembiayaan yang didapat dan menggunakan dana pembiayaan sesuai potensi yang dimiliki sehingga dapat bermanfaat dan tidak merugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, & Titin. (2014). Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Melalui Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten. *Penelitian Humoniora*, 154-167.
- Arifin, Z. (2009). *Evaluasi Pembelajaran (Prinsip, Teknik, Prosedur)*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Asiyah, B. N. (2015). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: KALIMEDIA.
- Asmorowati, S. (2005). Dampak Pemberian Kredit Mikro untuk Perempuan: Analisis Pengadopsian Model Grameen bank di Indonesia).
- Astuti, M. (2012). Pemberdayaan Perempuan Miskin Berbasis Pemanfaatan Sumberdaya Lokal Melalui Pendekatan Social Entrepreneurship (Studi Khusus di Daerah Tertinggal, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat). *Sosiokonsepia Vol. 17, No. 03*.
- Auliya, D. H. (2014). Kontribusi Program TUR (Tunas Usaha Rakyat) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perempuan Miskin Di Pedesaan (Studi Khusus Pada BTPN Syariah Cabang Taraju, Tasikmalaya, Jawa Barat).
- Danang Sunyoto, S. S. (2011). *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Jakarta: CAPS.
- DSN-MUI. (2000, April 1). *Fatwa-DSN-MUI*. Dipetik September 10, 2018, dari [https://dsnmui.or.id/produk/fatwa/?wpv\\_view\\_count=269-TCPID272&wpv\\_post\\_search=&tahun\\_masehi%5B%5D=&tahun\\_hijri%5B%5D=&ketua%5B%5D=&nomor\\_fatwa%5B%5D=&wpv\\_paged](https://dsnmui.or.id/produk/fatwa/?wpv_view_count=269-TCPID272&wpv_post_search=&tahun_masehi%5B%5D=&tahun_hijri%5B%5D=&ketua%5B%5D=&nomor_fatwa%5B%5D=&wpv_paged)

- Hasan, A. (2009). *Manajemen Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasan, I. (2004). *Analisis Data dengan Statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Idrus. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- J.Moleong, L. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Jabar, S. A. (2004). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Karim, A. (2006). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kaswinata. (2013). Peran Sumut Sejahtera PT. Bank Sumut Dala Pemberdayaan Perempuan Di Kantor Cabang Pembantu Pasar Melati Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan. *Perspektif ISSN: 2085-0328*.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: EKONISIA.
- Nazwirman. (2008). JuPeranan Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Teknologi Informasi Dalam Mengembangkan Usaha Mikro. *Jurnal The Winners Volume 9 Nomor 2 September*.
- Nugroho, R. R. (2007). *Managemen Pemberdayaan*. Jakarta: Gramedia.
- Pradja, J. S. (2012). *Ekonomi Syariah*. Bandung: CV. Pustaka Setia Bandung.

- Pratiwi, R. (2014). Peranan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mendorong Usaha Kaum Perempuan. *Ekonomi dan Perbankan Syariah*.
- Rachna Fauzia Nurhuda, A. R. (2015). Pengaruh Pembiayaan Paket Masa Depan Terhadap Kesejahteraan Nasabah Di BTPN Syariah MMS Bojong Soang. *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah ISSN :2460-2159*.
- Rahayu, N. S. (2015). Kontribusi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Perempuan (Studi Khusus BMT di Kabupaten Sleman Yogyakarta). *Inovasi dan Kewirausahaan Vol. 4, No. 03*, 162-180.
- Sari, R. E. (2011). Upaya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Pengembangan Manajemen Usaha Kecil (Studi Deskriptif pada Kegiatan Usaha Kecil Ibu-ibu Desa Wirolegi Kabupaten Jember, Dampingan Pusat Studi Wanita UM Jember).
- Steelyana, E. (2013). Perempuan dan Perbankan : Sebuah Tinjauan Tentang Peran Inklusi Keuangan Terhadap Pengusaha UMKM Perempuan Di Indonesia. *The Winners Vol. 14, No. 02*, 95-103.
- Sudarsono, H. (2007). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sudijono, A. (2011). *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Supardi. (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*. Yogyakarta: UII Press.

Syahirman Yusi, Umiyati idris. (2009). *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kuantitatif*. Citrabooks Indonesia.

Tapno, H. (2012). Evaluation of Training and Development: An Analysis of Various Models. *IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)*, 16-22.

Tayibnapis, F. Y. (2008). *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi: Untuk Program Pendidikan dan Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tely, A. E. (2010). Analisis Pengembangan Usaha Mikro dalam Mendukung Pemberdayaan Perempuan di Pulau Bunaken, Kota Manado, Sulawesi Utara. *Manajemen IKM Vol. 5 No. 2 ISSN 2058-8418*.

Toha, M. C. (1996). *Teknik Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

www.btpn. (2018). *Bank BTPN*. Dipetik Agustus 29, 2018, dari <https://www.btpn.com/id/tentang-kami/btpn-syariah>

www.btpnsyariah. (2018). *BTPN Syariah*. Dipetik Agustus 29, 2018, dari <https://www.btpnsyariah.com/index.php/id/tentang-kami/visi-misi-dan-nilai.html>

www.btpnsyariah. (2018, 1 1). *BTPN Syariah*. Dipetik 1 24, 2018, dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional TBK: <https://www.btpnsyariah.com/produk/pembiayaan/paket-masa-depan.html>

Zhang, D. L. (2017). The CIPP Evaluation Model: How to Evaluate for Improvement and Accountability. Dalam D. L. Stufflebeam, *The CIPP Evaluation Model: How to Evaluate for Improvement and Accountability*. New York: Guilford Publications.



# LAMPIRAN

## Lampiran 1

Hasil wawancara

Narasumber : Ibu Tiara Mega Zatira  
 Jabatan : Manajer BTPN Syariah MMS Eromoko  
 Tempat : Kantor BTPN Syariah MMS Eromoko.  
 Sengon RT 002/ RW 001, Eromoko, Wonogiri  
 Tanggal : Senin, 25 Juni 2018

### A. Context

#### 1. Bagaimana sejarah berdirinya BTPN Syariah ?

Pada awalnya PT BTPN Syariah Tbk didirikan dengan nama PT Bank Purba Danarta (BPD) yang berpusat di Semarang berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tanggal 7 Maret 1991 dengan lisensi bank non-devisa. Bank BTPN kemudian mengakuisis 70% saham di Bank Sahabat pada 30 Januari 2014 dan mengkonversinya menjadi Bank Syariah berdasarkan keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 22 Mei 2014. Unit Usaha Syariah di BTPN, yang dibentuk pada Maret 2008, spin-off ke Bank Syariah yang baru pada Juli 2014

#### 2. Produk apa saja yang diperuntukan untuk membantu diadakannya program PMD?

Pembiayaan dengan plafond 1-0 juta, Tabungan, Asuransi, Pelatihan Dasar Keanggotaan

#### 3. Apa tujuan dari dibentuknya program PMD ?

Untuk memperdayakan wanita dari keluarga pra sejahtera dan cukup sejahtera melalui kegiatan produktif.

#### 4. Kriteria masyarakat seperti apa yang ditetapkan mendapatkan pembiayaan ?

Perempuan yang belum menikah, sudah menikah atau pernah menikah dari keluarga pra sejahtera dan cukup sejahtera yang memiliki keinginan untuk berusaha.

5. Apa akad yang digunakan dalam program PMD?

Pembiayaan PMD menggunakan akad *Wakalah wal murabahah*

6. Bagaimana mekanisme operasional program PMD ini ?

Paket Masa Depan (PMD) memberikan fasilitas pembiayaan senilai Rp 1- 50 juta yang dibayarkan melalui cicilan setiap dua minggu dalam waktu satu tahun. Di akhir periode nasabah dengan *track record* bagus selama masa pembiayaan, dalam artian nasabah membayar angsuran tepat waktu dapat mengajukan dan mendapat pembiayaan pada periode berikutnya dengan plafond dua kali lipat dari pembiayaan sebelumnya. PMD mewajibkan seluruh nasabah memiliki tabungan selama masa pembiayaan. Tabungan tersebut memiliki akad wadiah dan merupakan bentuk komitmen serta edukasi budaya menabung bagi Nasabah PMD, tanpa ada saldo minimum, dan dapat digunakan selama menjadi Nasabah BTPN Syariah. Setiap Nasabah PMD juga dilindungi dengan manfaat Asuransi jiwa untuk menjamin kepentingan nasabah dan bank

7. Bagaimana perkembangan minat nasabah selama ini ?

Perkembangan minat nasabah sangat positif dari tahun pertama ke tahun kedua berkembang sejauh 716 nasabah. Untuk awal pembukaan disambut dengan baik.

8. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam memperkenalkan program PMD kepada masyarakat?

Pendukung : Mendapat dukungan dari aparat pemerintah kecamatan/kelurahan karena kegiatan prosomi kita awali melalui aparat pemerintah. Penghambat : mayoritas masyarakat pedesaan takut untuk memiliki pinjaman dengan bank, mayoritas masyarakat pedesaan bekerja sebagai petani mereka lebih memilih melakukan kredit dengan koperasi (Plecit) .

9. Bagaimana persepsi perkembangan program PMD sampai saat ini ?

Perkembangan program ini sangat baik dan konsisten. Terbukti dari jumlah nasabah yang sekitar 100-200 berkembang menjadi ribuan berarti program PMD ini bagi masyarakat umum sangat membantu dan dapat diterima. Salah satu alasannya yaitu tidak adanya jaminan seperti bank lain

10. Apakah kelemahan dan kelebihan PMD dari produk lain?

Kelemahan : karena tidak menggunakan jaminan membuat nasabah meremehkan apabila ada salah satu nasabah yang tidak membayar mempengaruhi nasabah lain sehingga ikut tidak membayar tanpa memikirkan BI Checking. Kelebihan : Tidak menggunakan jaminan, petugas turun langsung kelapangan untuk semua proses pembiayaan tanpa mengharuskan nasabah datang ke bank,

### **B. Pertanyaan mengenai Input**

1. Apa syarat-syarat untuk mengajukan pembiayaan ?
  - a) Perorangan, Warga Negara Indonesia (WNI), dan berkedudukan di Indonesia;
  - b) Wanita dari keluarga pra sejahtera dan cukup sejahtera yang sudah memiliki usaha atau yang ingin memiliki usaha;
  - c) Usia minimum 18 tahun bagi wanita yang sudah menikah/pernah menikah dan minimal 21 tahun bagi wanita yang belum menikah dengan usia maksimal 60 tahun;
  - d) Wajib memiliki tanda identitas pengenalan (KTP);
  - e) Bagi nasabah yang tidak memiliki tempat tinggal tetap (mengontrak) namun berada di area operasional MMS, maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu.
  - f) Apabila diketahui nasabah bertempat tinggal di atas tanah milik pihak ketiga, maka wajib dilakukan verifikasi atas kepemilikan lahan/tanah.
  - g) Jika dalam 1 rumah terdapat beberapa keluarga atau beberapa calon nasabah, maka yang diperkenankan menjadi nasabah hanya 1 orang diantaranya.

h) Nasabah memiliki kapasitas bayar yang memadai sesuai dengan standar *IIR (Installment to Income Ratio)* yang berlaku.

2. Bagaimana reaksi nasabah terhadap program PMD (pembiayaan) yang diberikan?

Reaksi yang diberikan nasabah sangat baik, nasabah merasa sangat terbantu khususnya nasabah yang sebelumnya belum memiliki usaha. Apalagi petugas tidak segan untuk membantu mensukseskan usaha nasabah misalnya petugas membantu memasarkan produk olahan dari nasabah sehingga terjalin hubungan yang baik antar nasabah dengan petugas.

3. Strategi apa yang dilakukan oleh BTPN Syariah dalam memperkenalkan program PMD ?

Diawali dengan memperkenalkan produk PMD ke aparat pemerintahan kecamatan dan kantor polisi (untuk meminta perlindungan apabila dalam berjalannya program PMD terjadi masalah yang tidak diinginkan), selanjutnya ke kelurahan guna memperkenalkan program PMD sekaligus meminta izin , selanjutnya petugas mengikuti kegiatan perkumpulan ibu-ibu seperti arisan dan pengajian untuk kegiatan promosi langsung ke ibu-ibu dan langsung mendata ibu-ibu yang berminat menjadi calon nasabah untuk ditindak lanjuti.

4. Apakah ada pendampingan dari pihak bank kepada nasabah?

Ada. Pendampingan dimulai dari pencairan pembiayaan, pembelanjaan dana pembiayaan apakah modal digunakan sesuai akad, untuk periode awal pembiayaan petugas berkunjung seminggu sekali ke nasabah untuk pengecekan, selanjutnya apabila ada nasabah yang membutuhkan bantuan petugas akan membantu misal nasabah butuh bantuan pemasaran produk maka petugas akan membantu memasarkan produk sampai nasabah mampu memasarkan produknya secara mandiri. Pendampingan juga sangat diperlukan untuk nasabah karena mayoritas nasabah merupakan masyarakat kampung sehingga sangat pesimis untuk

memulai usaha dan keberhasilan usahanya sehingga peran petugas dalam pendampingan ini sangat dibutuhkan

5. Berapa jumlah karyawan yang bertugas untuk program PMD?

Untuk BTPN Syariah MMS Eromoko ada 4 orang

6. Bagaimana kriteria karyawan yang ditetapkan untuk program PMD?

Harus ramah, sopan, bisa beradaptasi dengan masyarakat, minimal lulusan SMA

7. Apakah ada kegiatan pembinaan karyawan guna meningkatkan kualitas karyawan?

Ada. Pertama adalah Training untuk karyawan baru mengenai program PMD secara keseluruhan, strategi pemasaran, metode pendekatan dengan nasabah dan dilakukan selama 4 hari, kedua merupakan training setelah kenaikan pangkat dimana diajarkan mengenai penanganan terhadap nasabah baik lancar/ macet, cara penanganan kepada petugas. Selanjutnya pelatihan-pelatihan seperti peningkatan sistem teknologi dll

8. Berapa modal awal program PMD hingga saat ini? -

9. Apakah sudah ada SOP yang jelas dari program PMD? Mendukung atau tidak?

Sudah dan sangat jelas. Sangat mendukung dan tidak menyulitkan dan semua kegiatan dilapangan dilakukan sesuai SOP. Walaupun untuk setiap petugas memiliki strategi pemasaran masing-masing tetapi untuk kegiatan dilapangan tetap sesuai SP, walaupun kadang ada yang tidak sesuai SOP dikarenakan kebutuhan tetapi pada saat pembiayaan sudah berjalan akan tetap berpedoman dengan SOP.

10. Apa saja fasilitas yang diberikan kepada karyawan guna mendukung pelayanan kepada nasabah? Apakah ada fasilitas pendukung untuk nasabah ?

Karyawan : Motor, uang bensin, wisma, sembako (kebutuhan pokok), fasilitas cleaner (masak,cuci,setrika,bersih-bersih).Nasabah : tidak (HP). Kalau hadiah ada seperti sembako, piring, pisau, baskom dll.

11. Bagaimana rencana strategis guna mengantisipasi kelemahan program PMD?

Dengan diadakannya uang solidaritas/ uang kwer-kwer. uang solidaritas merupakan uang iuran yang dikumpulkan setiap pertemuan rutin sentra dari setiap nasabah sesuai kesepakatan kelompok. Uang solidaritas ini digunakan untuk membayar apabila dari salah satu kelompok ada anggota yang tidak bisa bayar. Karena di BTPN Syariah tidak ada sistem menyita harta nasabah yang tidak bisa bayar.

12. Bagaimana strategi alternatif dari semua kemungkinan kegagalan yg timbul?

Kegagalan yang sering timbul yaitu nasabah macet dan tidak mampu menyelesaikan pembiayaan maka tugas petugas mms yaitu dengan mencari nasabah baru dan pencairan yang baru yang mau berkomitmen dalam pembiayaan. Dengan pencairan baru yang lebih besar maka kerugian yang ditimbulkan dari nasabah macet akan teratasi dan MMS aman.

Jika pembiayaan tidak digunakan sesuai akad maka petugas akan mencari tahu alsannya dahulu jika alsannya memang tidak bisa diterima maka nasabah harus melakukan pelunasan.

### **C. Pertanyaan mengenai *Procces***

1. Apakah peluang dan hambatan yg didapat selama menjalankan program PMD?

Peluangnya yaitu mendapat dukungan dari aparat pemerintahan, usaha mikro sedang berkembang pesat di daerah pedesaan. Sedangkan, hambatan adalah pola pikir masyarakat pedesaan tentang Bank yang dianggap menakutkan, persaingan dengan lembaga keuangan yang sejenis, persaingan dengan program pembiayaan yang sejenis di Kecamatan Eromoko.

2. Siapakah penanggungjawab program PMD?

Untuk BTPN Syariah MMS Eromoko yg bertanggung jawab adalah Manajer kantor/ *Senior Community Officer*

3. Siapakah yang diprioritaskan dalam program PMD?

Tentu ibu-ibu yang menjadi nasabah dan tidak ada pengecualian.

4. Bagaimanakah realisasi pelaksanaan program PMD dilapangan?

Untuk realisasi dilapangan banyak yang dilakkang ,petugas menjalankan semua urutan prosedur yang sudah ditentukan di SOP. PMD menggunakan ada *Wakalah wal Murabahah*, dengan pelaksanaan akad wakalah terlebih dahulu untuk pembelian barang oleh nasabah dilanjutkan akad murabahah untuk penyerahan barang dari bank ke nasabah. Banyak juga dijumpai khusus yang tidak diinginkan dilapangan seperti banyak penyelewengan akad yang dilakukan nasabah seperti digunakan untuk membayar hutang dan tidak untuk modal usaha.

5. Bagaimana cara pembinaan kepada nasabah?

Bentuk pembinaan yang dilakukan dari Bank kepada nasabah yaitu PDK/Pelatihan Dasar Keanggotaan . Pelatihan Dasar Keanggotaan/PDK merupakan sarana untuk memberikan informasi secara rinci mengenai pembiayaan Paket Masa Depan dan diberikan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan secara sederhana. Calon nasabah wajib lulus PDK karena merupakan salah satu syarat untuk mengajukan permohonan pembiayaan.

PDK dilakukan selama 5 hari berturut-turut dengan materi yang berbeda-beda bagi nasabah baru dan semua calon nasabah wajib ikut dengan kehadiran 100%, untuk melihat keseriusan calon nasabah terhadap program PMD dan membangun kebersamaan. Di laksanakan selama 3 hari untuk nasabah lanjutan.

6. Bagaimana cara menentukan kriteria nasabah yang sesuai setelah sampai dilapangan?

- a. Dilakukan pengecekan usaha nasabah untuk nasabah yang sudah memiliki usaha, untuk memastikan usaha yang dijalankan nasabah sesuai dengan syariat Islam dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.



- b. Pengecekan kondisi ekonomi nasabah. Dilakukan observasi kondisi tempat tinggal, aset milik nasabah, penghasilan dalam sebulan, jumlah keluarga, dan hutang nasabah dengan lembaga keuangan lain.
  - c. Referensi tetangga dan aparat setempat untuk mengetahui track record nasabah tanpa diketahui oleh pihak lain khususnya nasabah PMD sendiri.
7. Berapa jumlah mitra program pembiayaan PMD dari awal hingga saat ini?

Pada awal pendirian di tahun 2014 nasabah pertama berjumlah 20 pada tahun 2016 mencapai 716, karena masalah nasabah macet turun hingga mencapai 416, dan untuk sekarang berjumlah 525.

8. Berapa frekuensi kunjungan petugas kepada nasabah?  
2 sampai 3 kali selama 2 minggu.
9. Bagaimana pola pembiayaan yang dilakukan nasabah?

a. Paket Masa Depan (PMD) Awal

PMD Awal (PMD siklus pertama) merupakan Pembiayaan PMD yang ditawarkan kepada calon nasabah baru baik yang belum memiliki usaha maupun yang sudah memiliki usaha. Jumlah pembiayaan PMD awal minimum Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan maksimal Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) bagi nasabah yang belum memiliki usaha sedangkan maksimum Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) bagi nasabah yang sudah memiliki usaha. Jangka waktu PMD siklus awal yaitu selama 1 tahun (12 bulan)

b. Paket Masa Depan (PMD) Siklus Lanjutan

PMD siklus lanjutan merupakan pembiayaan lanjutan dari PMD siklus awal bagi nasabah yang memenuhi syarat untuk mendapatkan tambahan jumlah pembiayaan. Jumlah pembiayaan PMD siklus lanjutan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disesuaikan dengan karakter dan

kemampuan bayar nasabah. Jangka waktu pembiayaan PMD siklus lanjutan yaitu 1 tahun (12 bulan) dan 1,5 tahun (18 bulan).

c. Paket Masa Depan (PMD) Peningkatan Modal Kerja

PMD peningkatan modal kerja merupakan pembiayaan lanjutan nasabah dengan kebutuhan modal yang lebih tinggi dari PMD awal dan PMD siklus lanjutan dengan ketentuan telah menyelesaikan dan lunas paket pembiayaan sebelumnya dan dinilai telah memiliki kemampuan usaha dan kemampuan bayar yang sesuai. Jumlah pembiayaan minimum Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan maksimum Rp 13.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) bagi nasabah yang pertama kali mengajukan PMD penambahan modal kerja sedangkan maksimum Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bagi PMD penambahan modal kerja lanjutan dengan jumlah waktu pembiayaan 1 tahun (12 bulan), 1.5 tahun (18 bulan), 2 tahun (24 bulan).

d. Paket Masa Depan (PMD) Tambahan

i. PMD Tambahan-Modal Kerja Tambahan

PMD Tambahan-Modal Kerja Tambahan merupakan fasilitas pembiayaan tambahan yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan tambahan modal sewaktu-waktu sebelum program pembiayaan selesai/lunas dengan jumlah tambahan minimum Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan maksimum Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

ii. PMD Tambahan- Perbaikan Tempat Usaha

PMD Tambahan- Perbaikan Tempat Usaha merupakan fasilitas pembiayaan tambahan untuk perbaikan rumah sebagai tempat usaha bagi nasabah yang telah memenuhi syarat. Jumlah pembiayaan yaitu 100% dari total biaya pembelian barang/material untuk perbaikan dengan

maksimal plafond sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

iii. PMD Tambahan – Pemilikan Handphone Produktif

PMD Tambahan – Pemilikan Handphone Produktif merupakan fasilitas pembiayaan ditujukan kepada nasabah yang belum memiliki HP sebagai alat penunjang transaksi

10. Apa sajakah jenis usaha dari nasabah?

Perdagangan (kelontong, sayur keliling, jamu keliling, jajan pasar, catering, baju, elektronik, produksi olahan), peternakan (lele, ayam, kambing), pertanian.

**D. Pertanyaan mengenai *Product***

1. Apakah tujuan yang ditetapkan sudah tercapai ? berapa persen?

Alhamdulillah sudah, sebesar 75%

2. Apakah program pmd yang diberikan memberikan dampak jelas pada nasabah pembiayaan PMD?

Iya. Dampak yang terlihat yaitu usaha nasabah semakin berkembang, nasabah yang sebelumnya belum memiliki usaha setelah mendapat pembiayaan dapat memiliki usaha mandiri, taraf hidup nasabah perlahan meningkat, menambah silaturahmi antar anggota baik nasabah dan petugas.

3. Bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh BTPN Syariah dalam mengambil keputusan apakah tujuan atau sasaran yang ingin dicapai telah tercapai atau tidak ?

Kegiatan evaluasi dilakukan dengan cara, PRS (Pertemuan Rutin Setra), SV (*Surprised Visit*), MU (monitoring Usaha), bukti belanja modal nasabah, dan foto usaha nasabah terbaru.

4. Bagaimana upaya BTPN Syariah dalam pemberdayaan ekonomi perempuan?

Dengan terus meningkatkan kualitas layanan melalui pembiayaan. Dimana pembiayaan kami tujukan kepada masyarakat pra sejahtera khususnya perempuan, melalui pembiayaan ini bank memberikan modal

untuk usaha nasabah dan diharapkan menjadikan nasabah menjadi perampuan yang mandiri dan dapat meningkatkan taraf hidup nasabah.

5. Siapa saja yang terlibat dalam evaluasi program PMD ?

Semua karyawan BTPN Syariah bertanggung jawab dalam evaluasi program.

6. Apakah hasil yang dicapai sesuai dengan visi, misi, dan tujuan ?

Sudah tetapi belum sepenuhnya karena tingkat penyelewengan masih tinggi karena ada beberapa nasabah yang tidak menggunakan pembiayaan sesuai dengan akad, nasabah menggunakan atas nama orang lain,

7. Apakah pelaksanaan program sudah sesuai dengan SOP?

Sudah 85 %. Semua kegiatan yang program ini selalu dilaksanakan dengan berpedoman pada SOP walaupun dalam keadaan tertentu petugas melanggar SOP tetapi demi berjalannya program ini.

8. Bagaimana kondisi nasabah sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan?

Berdasarkan hasil evaluasi sudah banyak nasabah yang terbantu seperti memiliki usaha bisa menambah modal, tetapi ada sebagian nasabah yang gagal pembiayaan /macet karena usahanya macet atau dana pembiayaan tidak digunakan semestinya.

## **Lampiran II**

### Draft Wawancara Nasabah

Wawancara untuk nasabah program pembiayaan PMD BTPN Syariah :

#### A. Data diri responden

1. Nama :
2. Usia :
3. Alamat :
4. Status :
5. Pendidikan :
6. Nama suami :
7. Pekerjaan suami :
8. Tempat :

9. Tanggal :

B. Pertanyaan mengenai *Context*

1. Apa pekerjaan ibu sebelum dan sesudah mengambil pembiayaan ini ?
2. Apa motivasi ibu dalam mengambil pembiayaan ini?
3. Apa alasan ibu mengambil pembiayaan ini ?
4. Menurut ibu, apakah kekurangan dan kelebihan program ini?

C. Pertanyaan mengenai *Input*

1. Apa sajakah fasilitas yang diberikan dari BTPN Syariah ?
2. Apakah BTPN Syariah melakukan pendampingan secara rutin?
3. Menurut ibu, apakah petugas sudah kompeten dibidangnya?

D. Pertanyaan mengenai *Process*

1. Berapa jumlah pembiayaan yang ibu ambil dalam program PMD ?
2. Berapa jumlah angsurannya ?
3. Bagaimana system pembayaran dan jangka waktu pembayaran ?
4. Apakah jenis akad yang digunakan dalam pembiayaan?
5. Setelah mendapatkan pembiayaan, apakah dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan utama ?
6. Berapa kali kunjungan yang dilakukan petugas ?

E. Pertanyaan mengenai *Product*

1. Bagaimana pendapatan ibu setelah menerima pembiayaan
2. Setelah mendapatkan pembiayaan, bagaimana pengelolaan keuangan keluarga ibu?
3. Setelah mendapatkan pembiayaan, apakah ibu masih ketergantungan pendapatan suami ?
4. Setelah mendapatkan pembiayaan, apakah ibu mampu memutuskan membeli sesuatu (misalnya kebutuhan anak) tanpa harus meminta dari suami ?
5. Apakah terjadi perubahan yang signifikan dalam hal keuangan setelah mendapatkan pembiayaan ini?
6. Apakah program pembiayaan PMD ini sangat membantu?

### Lampiran III Struktur Organisasi



### Lampiran IV

### Kartu Angsuran

Tgl	Angsuran Kec	Sisa Utang (Rp)	TM Pemasangan Bank
1	75.000	1.872.000	Kec.
2	75.000	1.794.000	
3	75.000	1.716.000	
4	75.000	1.638.000	
5	75.000	1.560.000	
6	75.000	1.482.000	
7	75.000	1.404.000	
8	75.000	1.326.000	
9	75.000	1.248.000	
10	75.000	1.170.000	
11	75.000	1.092.000	
12	75.000	1.014.000	
13	75.000	936.000	
14	75.000	858.000	
15	75.000	780.000	
16	75.000	702.000	
17	75.000	624.000	
18	75.000	546.000	
19	75.000	468.000	
20	75.000	390.000	
21	75.000	312.000	
22	75.000	234.000	
23	75.000	156.000	
24	75.000	78.000	
25	75.000	0	



*Check-List Observasi*

A. Identitas Objek

1. Lokasi : BTPN Syariah MMS Eromoko
2. Waktu : Senin, 25 Juni 2018

B. Aspek yang di observasi

No	Aspek	Kesesuaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
	<b>Fasilitas Karyawan</b>			
1	Kendaraan Petugas	V		
2	Wisma	V		
	<b>Dokumen</b>			
1	SOP Program PMD	V		Sekitar 85 %
2	Kartu angsuran	V		
3	Kartu tabungan	V		
4	Form absensi nasabah	V		
5	Brosur media iklan	V		
6	Laporan keuangan nasabah		V	Tidak ada laporan keuangan tetapi laporan nota belanja dan foto usaha terbaru
7	Usaha nasabah	V		
8	Rumah nasabah	V		
	<b>Pelaksanaan Program</b>			
1	Akad ( <i>wakalah wal murabahah</i> )	V		
2	PDK (Pelatihan Dasar Keanggotaan)	V		
3	Berkunjung ke aparat pemerintahan	V		



4	Kunjungan petugas	V		
5	Pendampingan nasabah	V		
6	Sikap ramah petugas	V		
7	Penyelesaian pembiayaan bermasalah	V		
<b>Kesesuaian dengan realisasi di lapangan</b>		<b>94%</b>	Cukup sesuai dengan hasil wawancara internal	

Note :

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti mengenai kesesuaian prosedur program PMD dengan realisasi pelaksanaan program di lapangan peneliti memberikan rating 94 %.

Eromoko, 10 September 2018

Petugas



( Tiara Mega Zatira )

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Wonogiri pada tanggal 19 September 1996 sebagai anak ketiga dari 3 bersaudara dari pasangan Alm. Manting Sudarsono dan Wardinem. Saat ini ia bertempat tinggal di Wonosobo, Rt 002/Rw 001, Wonodadi, Pracimantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Hp: 082134825496. Alamat E-mail: [ririsa03@gmail.com](mailto:ririsa03@gmail.com). Pendidikan SMU di tempuh di SMA N 1 Pracimantoro, lulus pada tahun 2014, penulis diterima di program studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.